



LKjIP

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

BIALA KOTA

2025

**SEKRETARIAT DAERAH
KOTA SAMARINDA**



KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas perkenannya dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat Daerah Kota Samarinda Tahun 2025, sesuai amanat dari Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Walikota Samarinda Nomor 29 Tahun 2011 tentang Pedoman SAKIP Pemerintah Kota Samarinda.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat Daerah Kota Samarinda merupakan wadah bagi pelaporan kinerja selama 1 (satu) tahun dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan pencapaian kinerja dan berisi uraian pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi serta kewenangan pengelolaan sumber daya dan kebijaksanaan operasional dalam rangka pencapaian visi dan misi Sekretariat Daerah Kota Samarinda, serta penjelasan tentang kinerja, capaian dan analisis capaian kinerja.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat Daerah Kota Samarinda Tahun 2025 merupakan media pertanggungjawaban yang dikaitkan dengan Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kota Samarinda tahun 2025- 2029, hal ini merupakan wujud dari keinginan Sekretariat daerah Kota Samarinda untuk dapat menyajikan pertanggungjawaban yang transparan dan akuntabel, dalam memenuhi harapan masyarakat yaitu Terwujudnya *Clean Government* dan *Good Governance*.



HERO MARDANUS SATYAWAN



RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2025 disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja Sekretariat Daerah Kota Samarinda dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan di Kota Samarinda. Penyusunan laporan ini berpedoman pada Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) serta selaras dengan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025–2029 yang mengacu pada RPJMD Kota Samarinda.

Sebagai unsur staf yang membantu Wali Kota dalam perumusan kebijakan, pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, serta pelayanan administratif, Sekretariat Daerah berkomitmen mewujudkan tata kelola pemerintahan yang inovatif, responsif, adaptif, berintegritas, dan akuntabel. Komitmen tersebut dijabarkan dalam tujuan dan sasaran strategis yang terukur melalui indikator kinerja utama.

Pada periode Renstra 2025-2029, Sekretariat Daerah menetapkan 2 (dua) sasaran, yaitu :

1. Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Kinerja Pemerintah Daerah, dengan indikator:

- Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Komponen Pelaporan
- Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pemerintah Kota

2. Meningkatnya Kualitas Kebijakan Pemerintah, dengan indikator:

- Indeks Kualitas Kebijakan (IKK)

Secara keseluruhan, capaian kinerja tahun 2025 menunjukkan arah yang positif dan sejalan dengan target Renstra 2025–2029. Ke depan, Sekretariat Daerah akan terus melakukan langkah-langkah strategis dan inovatif untuk meningkatkan akuntabilitas, kualitas kebijakan, serta kepuasan masyarakat, sebagai bagian dari kontribusi nyata dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan berorientasi hasil.



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN EKSEKUTIF.....	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	vi
DAFTAR GRAFIK	vii
BAB. I PENDAHULUAN	
A. Dasar Pembentukan	1
B. Landasan Hukum	1
C. Tugas dan Fungsi	3
D. Struktur Organisasi	3
E. Sumber Daya Aparatur	5
F. Aspek Strategis Organisasi	8
G. Permasalahan Utama (Isu Strategis)	8
H. Sarana dan Prasarana	9
BAB. II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	
A. Perencanaan Strategis	10
B. Indikator Kinerja Utama	43
C. Perjanjian Kinerja Tahun 2025	46
1. Rencana Anggaran Tahun 2025	47
2. Target Belanja Setda Kota Samarinda Tahun 2025	48
BAB. III AKUNTABILITAS KINERJA	
A. Laporan Hasil Evaluasi Atas Implementasi AKIP Tahun Sebelumnya ...	49
1. Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	49
2. Tindak Lanjut Atas Hasil Evaluasi Inspektorat Kota Samarinda	50
B. Pengukuran Capaian Kinerja Organisasi	51
C. Analisis Capaian Kinerja	52
1. Membandingkan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024..	53
2. Membandingkan Antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun ini dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir	54



3. Membandingkan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun Ini Dengan Target RPJMD /Renstra Tahun 2025-2029	54
4. Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Standar Nasional	55
5. Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan atau Peningkatan / Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi Yang Akan dilakukan	56
6. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	62
7. Analisis Program atau Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan	63
D. Realisasi Anggaran	64
1. Realisasi Anggaran Sesuai Dengan Perjanjian Kinerja	64
2. Realisasi Anggaran Per Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	65
E. Penilaian Kinerja Organisasi.....	79
 BAB. IV PENUTUP	 80

Lampiran- Lampiran :

1. Perjanjian Kinerja Tahun 2025
2. Pengukuran Kinerja Tahun 2025
3. Indikator Kinerja Utama Sekretariat Daerah 2025
4. Realisasi Keuangan Setda Kota Samarinda Tahun 2025
5. Evaluasi Renja Tahun 2025



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Sumber Daya Aparatur Pada Sekretariat Daerah Kota Samarinda Per 31 Desember 2025	5
Tabel 1.2	Sarana dan Prasarana Kerja Sekretariat Daerah Kota Samarinda Tahun 2025	9
Tabel 2.1	Tujuan, Indikator Tujuan, Sasaran Strategis, Indikator Kinerja dan Target	12
Tabel 2.2	Program/Kegiatan Untuk Mencapaian Tujuan/Sasaran	13
Tabel 2.3	Indikator Kinerja Utama	44
Tabel 2.4	Perubahan Indikator Kinerja Utama	45
Tabel 2.5	Perjanjian Kinerja Tahun 2025	47
Tabel 2.6	Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2025	47
Tabel 2.7	Target Belanja Sekretariat Daerah Kota Samarinda Tahun 2025	48
Tabel 3.1	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Tahun 2021 -2024	50
Tabel 3.2	Rekomendasi, Tindak Lanjut dan Rencana Aksi	50
Tabel 3.3	Pengukuran Kinerja Tahun 2025	52
Tabel 3.4	Perubahan Pengukuran Kinerja Tahun 2025	52
Tabel 3.5	Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja	53
Tabel 3.6	Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun Ini Dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir	54
Tabel 3.7	Realisasi Kinerja dan Target Akhir RPJMD/RENSTRA	54
Tabel 3.8	Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Tahun 2025	62
Tabel 3.9	Program Prioritas Dalam Pelaksanaan Sasaran Strategis Tahun 2025	63
Tabel 3.10	Realisasi Anggaran Sesuai Dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2025	64
Tabel 3.11	Realisasi Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Triwulan IV	65
Tabel 3.12	Penilaian Kinerja Organisasi.....	79



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Kota Samarinda	4
--	---



DAFTAR GRAFIK

Grafik 1.1	Pengelompokan PNS & P3K dan P3K Paruh Waktu Berdasarkan Jenis Kelamin	6
Grafik 1.2	Pengelompokan PNS Berdasarkan Golongan	7
Grafik 1.3	Pengelompokan PNS & P3K dan P3K Paruh Waktu Berdasarkan Pendidikan	7



BAB I PENDAHULUAN

A. DASAR PEMBENTUKAN ORGANISASI

Untuk mewujudkan aparatur negara yang profesional serta memahami tugas dan fungsinya, diperlukan keterpaduan langkah dan koordinasi yang optimal agar penyelenggaraan pemerintah berjalan efektif, stabil dan dinamis. Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Instruksi ini mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara negara untuk mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas, fungsi dan perannya dalam pengelolaan sumber daya kebijakan yang diamanatkan kepadanya berdasarkan perencanaan strategis yang ditetapkan dalam suatu sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sistem AKIP).

Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang telah ditindaklanjuti dengan pembentukan Sekretariat Daerah Kota Samarinda melalui Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Walikota Samarinda Nomor 64 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Walikota Samarinda Nomor 20 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Samarinda. Sekretariat Daerah Kota (Setdakot) Samarinda merupakan unsur staf (pembantu pimpinan pemerintah daerah) yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah (Sekda) yang berada dan bertanggung jawab kepada Walikota Samarinda.

B. LANDASAN HUKUM

Landasan hukum penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Sekretariat Daerah Kota Samarinda Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. TAP MPR No. XI/MPR/1999 tentang Penyelenggaraan yang bersih dan bebas dari KKN;



2. Undang-undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang Undang No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Undang Undang No. 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
7. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Tekhnis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Samarinda tahun 2021-2026;
10. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun anggaran 2023.
11. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 84 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.
12. Peraturan Walikota Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Samarinda Nomor 84 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.
13. Peraturan Walikota Nomor 33 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota Samarinda Nomor 84 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.



14. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 103 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Samarinda;

C. TUGAS DAN FUNGSI

Berdasarkan Peraturan Walikota Samarinda Nomor 103 Tahun 2021 tugas pokok Sekretariat Daerah Kota Samarinda adalah membantu Walikota dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif.

Dalam Pasal 4 Peraturan Walikota Samarinda Nomor 103 Tahun 2021 untuk menyelenggarakan tugas pokoknya, Sekretariat Daerah Kota Samarinda mempunyai fungsi :

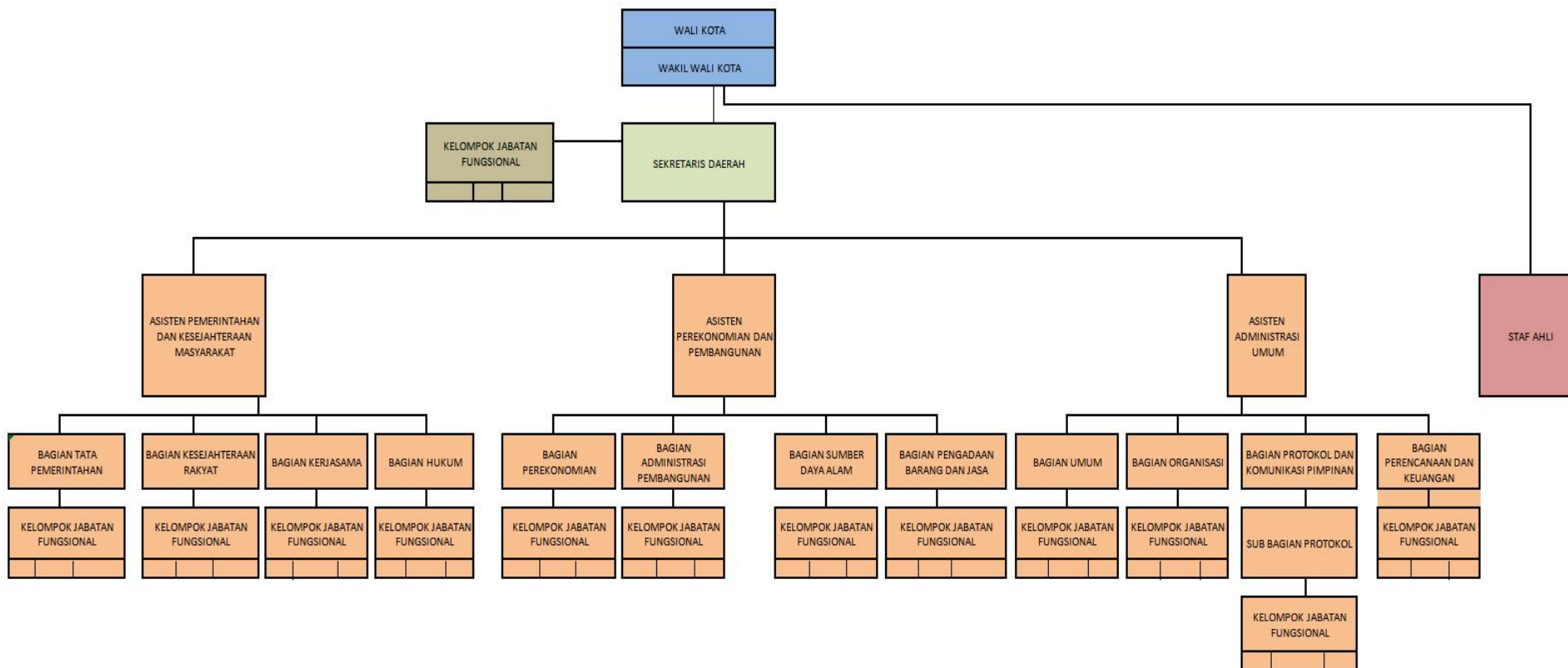
- a. Perumusan dan penetapan Program Kerja Sekretaris Daerah ;
- b. pengoordinasian penyusunan kebijakan Pemerintah Daerah;
- c. Pengoordinasian penyusunan strategis kebijakan pembangunan pada urusan Pemerintahan;
- d. Pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah ;
- e. Pemantauan dan evaluasi kebijakan Daerah ;
- f. Pelayanan administrasi dan pembinaan aparatur sipil negara pada instansi Daerah;
- g. Penyelenggaraan tugas Sekretariat Daerah ;
- h. Penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan tugas dan fungsi Staf ahli ; dan
- i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Wali Kota terkait tugas dan fungsinya.

D. STRUKTUR ORGANISASI

Bagan Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Kota Samarinda sesuai dengan Peraturan Walikota Samarinda Nomor 103 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Samarinda dapat dilihat pada Gambar 1.1 berikut :



Gambar 1.1
Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Kota Samarinda





E. SUMBER DAYA APARATUR

Sumber Daya Aparatur merupakan salah satu faktor yang berpengaruh terhadap keberhasilan pelaksanaan tugas-tugas dan peran Sekretariat Daerah dalam menghadapi dinamika perubahan lingkungan strategis. Dengan Sumber Daya Manusia yang kompeten dan profesional, Sekretariat Daerah Kota Samarinda diharapkan dapat melaksanakan tugas dengan lebih baik lagi.

Guna menghadapi perkembangan teknologi modern saat ini harus diimbangi dengan peningkatan Sumber Daya Aparatur yang memadai, berkualitas dan mampu menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. Berikut ini data mengenai PNS dan Non PNS yang berada di lingkungan Sekretariat Daerah Kota Samarinda per 31 Desember 2025 pada Tabel dibawah ini:

Tabel 1.1
Sumber Daya Aparatur pada Sekretariat Daerah Kota Samarinda
Per 31 Desember 2025

Jabatan			Jenis Kelamin		Golongan					Pendidikan					
	PNS	P3K	L	P	IV	III	II	I	P3K	S2	S1	Diplo ma	SLTA	SLTP	SD
Sekretaris Daerah	1		1	-	1	-	-	-		1	-	-	-	-	-
Asisten	3		3	-	3	-	-	-		3	-	-	-	-	-
Staf Ahli	1		1	-	1	-	-	-		1	-	-	-	-	-
Kepala Bagian	11		9	2	9	2	-	-		11	-	-	-	-	-
Kepala Sub Bagian	1		1		-	1	-	-		1		-	-	-	-
Fungsional	28	10	26	13	5	23			10	3	35				
Pelaksana	111	28	78	61		100	11		28	2	66	5	66		
Paruh Waktu		117	65	52					117	2	73	2	34	2	4
Jumlah PNS & P3K	311		183	128	19	126	11		155	24	174	7	100	2	4

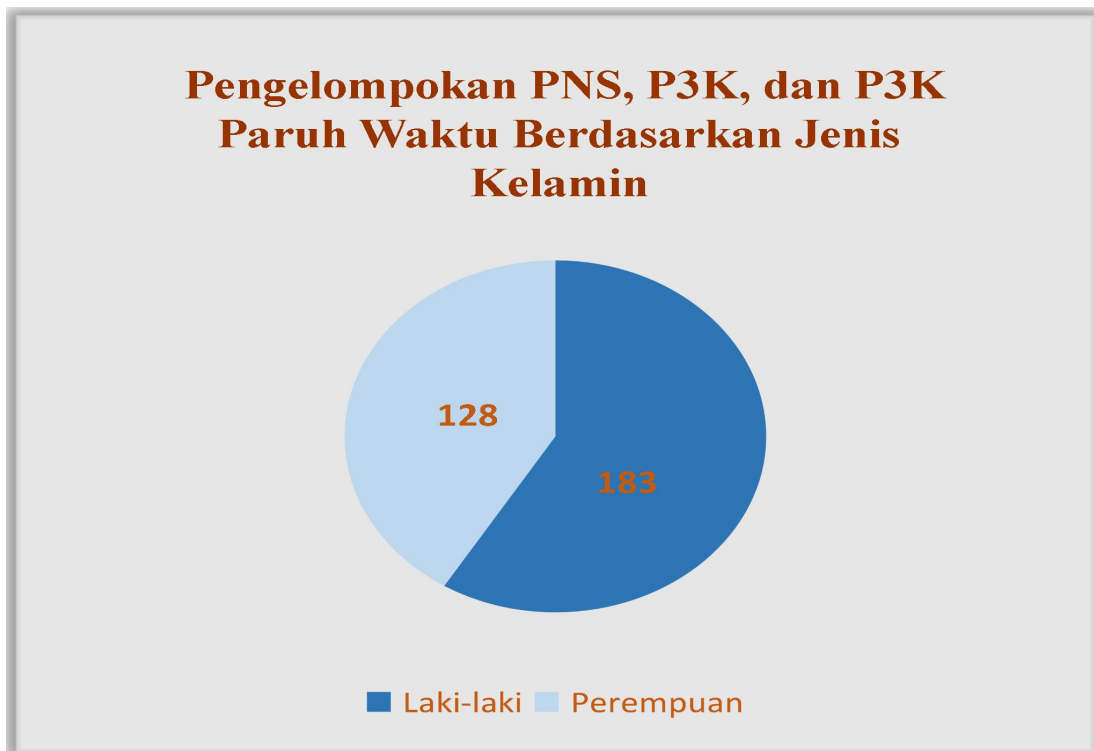
Sumber :Bagian Umum Setda Kota Samarinda

Berdasarkan tabel 1.1, jumlah Pegawai Sekretariat Daerah Kota Samarinda secara keseluruhan sebanyak 311(Tiga Ratus Sebelas) orang. 183 (Seratus



Delapan Puluh Tiga) orang mayoritas pegawai adalah laki-laki dan pegawai Perempuan sebanyak 128 (Seratus Delapan Puluh Delapan) orang. Presentase pegawai berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada grafik 1.1 di bawah ini.

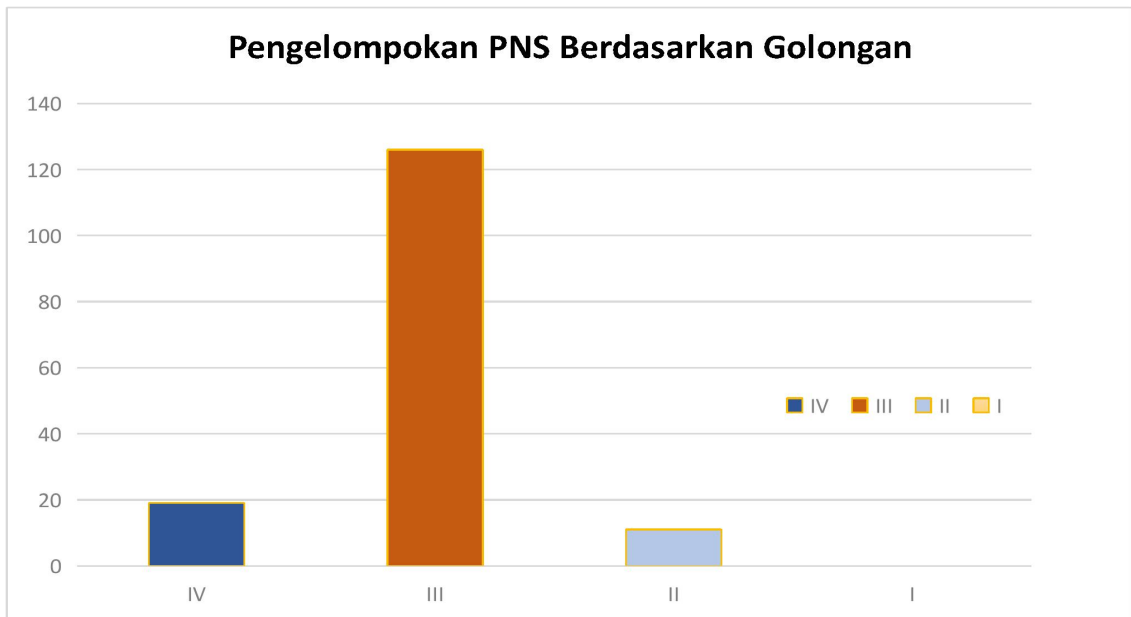
Grafik 1.1
Pengelompokan PNS & P3K, dan P3K Paruh Waktu Berdasarkan Jenis Kelamin



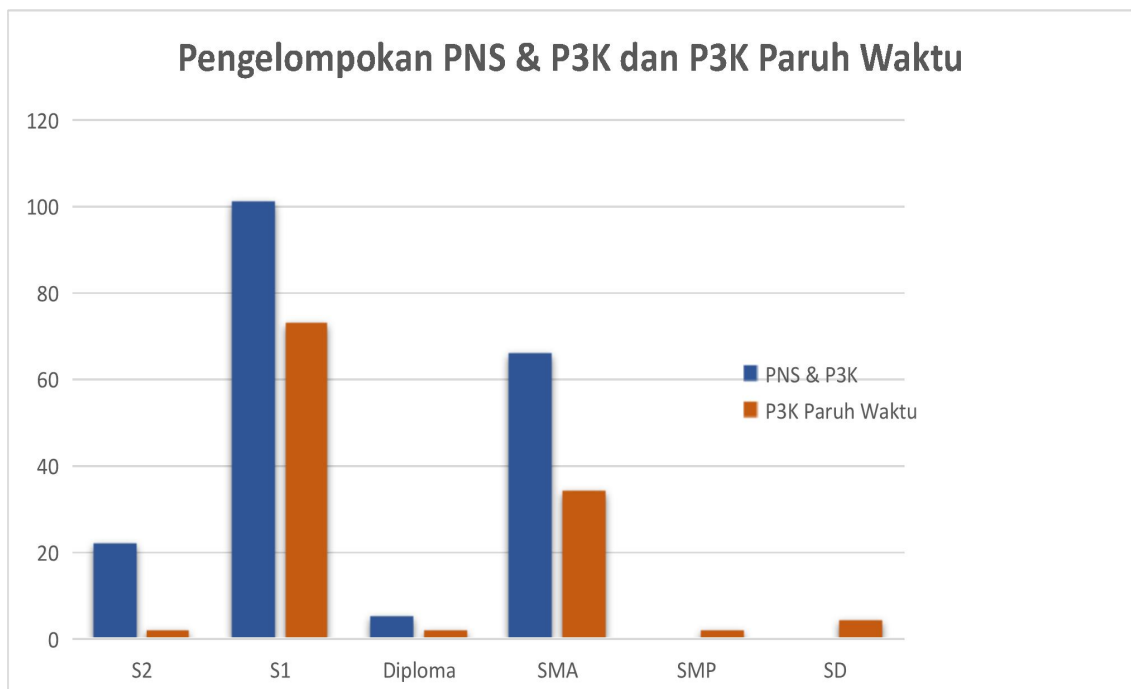
Dalam rangka memenuhi kebutuhan akan aparatur yang handal dan profesional di bidangnya, maka Sekretariat Daerah Kota Samarinda secara terus menerus berusaha meningkatkan kemampuan aparturnya, baik dari pendidikan maupun kepangkatan. Berikut grafik pengelompokan pegawai berdasarkan golongan:



Grafik 1.2
Pengelompokan PNS Berdasarkan Golongan



Grafik 1.3
Pengelompokan PNS&P3K dan P3K Paruh Waktu Berdasarkan Pendidikan





F. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI

Sekretariat Daerah sebagai unsur staf pada hakekatnya menyelenggarakan fungsi koordinasi, perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan tugas dinas daerah dan lembaga teknis daerah mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, pelaporan serta pelayanan adminisitratif.

Kepala Dinas, Kepala Badan, Inspektur Daerah dan Sekretaris DPR bertanggung jawab kepada Kelapa Daerah melalui Sekretaris Daerah. Fungsi Sekretaris Daerah dalam pertanggungjawaban tersebut adalah berperan dalam pengendalian administrasi untuk memverifikasi kebenaran administrasi atas pertanggungjawaban yang disampaikan.

Sekretariat Daerah Kota Samarinda mendukung pencapaian visi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), yaitu “Samarinda Maju untuk Kaltim Maju” dengan mengampu misi ke-5 yakni, Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel. Misi ini diuraikan lagi menjadi tujuan dan sasaran, sebagaimana yang tertuang dalam Renstra Sekretariat Daerah Kota Samarinda Tahun 2025-2029.

G. PERMASALAHAN UTAMA (ISU STRATEGIS)

Beberapa permasalahan utama di lingkungan Sekretariat Daerah Kota Samarinda dalam kurun waktu tahun 2025 adalah sebagai berikut.

1. Belum optimalnya koordinasi antar bagian di lingkungan Sekretariat Daerah Kota Samarinda
2. Belum optimalnya upaya pengendalian, pengawasan, monitoring dan evaluasi terhadap implementasi kebijakan di lingkungan Sekretariat Daerah Kota Samarinda
3. Akuntabilitas kinerja di lingkungan Sekretariat Daerah masih belum optimal untuk dijadikan budaya/dasar budaya kinerja.
4. Belum terpenuhinya dokumen perencanaan, pelaporan dan kepegawaian yang berkualitas.



H. SARANA DAN PRASARANA

Untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Sekretariat Daerah Kota Samarinda dilengkapi dengan sarana dan prasarana berupa tanah, bangunan kantor, kendaraan dinas, inventaris, dan fasilitas lainnya. Sarana dan prasarana tersebut sebagian dalam kondisi baik dan sebagian dalam kondisi kurang baik, namun diharapkan semuanya dapat dimanfaatkan secara optimal. Sarana dan Prasarana kerja yang terdapat di lingkungan Sekretariat Daerah Kota Samarinda Tahun 2025, dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.

Tabel 1.2
Sarana dan Prasarana Kerja Sekretariat Daerah Kota Samarinda
Tahun 2025

No	Uraian	Banyaknya	Satuan	Keterangan
1.	Gedung	7	Unit	
2.	Listrik	4	Jaringan	
3.	Air	4	Jaringan	
4.	Area Parkir	2	Area	
5.	Ruang Rapat	6	Ruang	
6.	Ruang Arsip	1	Ruang	
7.	Koperasi	1	Unit	
8.	Komputer	217	Unit	
9.	Printer	156	Unit	
10.	Meja	550	Unit	
11.	Kursi	787	Unit	

Sumber: Bagian Umum Sekretariat Daerah



BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. PERENCANAAN STRATEGIS

Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah sangat dipengaruhi dan merupakan penjabaran lebih rinci dari perencanaan pembangunan daerah Kota Samarinda, sehingga setiap langkah yang direncanakan dalam RENSTRA Sekretariat Daerah Kota Samarinda selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Samarinda Tahun 2025-2029.

Dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), perencanaan strategis membutuhkan integrasi antara keterampilan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya, agar dapat memenuhi tuntutan perubahan lingkungan strategis, baik di tingkat nasional maupun global.

Dasar dalam penyusunan tujuan dan sasaran RENSTRA Sekretariat Daerah Kota Samarinda Tahun 2025-2029 adalah Visi dan Misi yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Samarinda Tahun 2025-2029. Adapun Visi RPJMD Kota Samarinda Tahun 2021-2026 adalah: **“SAMARINDA MAJU UNTUK KALTIM MAJU”**.

Sesuai dengan harapan *“Samarinda Maju Untuk Kaltim Maju”* sebagai Visi RPJMD Kota Samarinda tahun 2025 – 2029, ditetapkan 5 (lima) **Misi** pembangunan daerah sebagai berikut :

1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) Samarinda yang unggul, berbudaya, dan berdaya saing;
2. Mewujudkan ekonomi Samarinda yang inklusif, mandiri dan berkelanjutan;
3. Mewujudkan infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan;
4. Mewujudkan Samarinda layak huni melalui stabilitas kamtibmas, ketahanan sosial budaya dan ekologis;
5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang integritas dan akuntabel.



Adapun Tujuan, Indikator Tujuan, Sasaran Strategis, Indikator Kinerja dan Target dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Sekretariat Daerah Kota Samarinda Tahun 2025-2029 dapat dilihat pada tabel **2.1**.



Tabel 2.1

Tujuan, Indikator Tujuan, Sasaran Strategis, Indikator Kinerja dan Target

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran pada Tahun ke-					Penanggung Jawab
				2025	2026	2027	2028	2029	
1	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Kinerja Pemerintah Daerah	Sasaran: Meningkatkan Kinerja dan Kualitas Pelayanan Pemerintah	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Komponen Pelaporan	11,75	12,16	13,05	13,56	14,55	Bagian Umum, Bagian Perencanaan dan Keuangan, Bagian Prokompim dan Bagian Organisasi
			Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pemerintah Kota	90,1	91,1	92,5	92,5	93,4	
2		Meningkatnya Kualitas Kebijakan Pemerintah	Indeks Kualitas Kebijakan (IKK)	50	50	50	50	65	Bagian Tata Pemerintahan, Bagian Kesra, Bagian Hukum, Bagian Kerja Sama, Bagian Perekonomian, Bagian Pembangunan, Bagian Pengadaan Barang dan Jasa, Bagian SDA

Sumber : RENSTRA Setda Kota Samarinda Tahun 2025-2029



Tabel 2.2

Program/Kegiatan untuk mencapai Tujuan/Sasaran

TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Kinerja Perangkat Daerah				Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) (Nilai)		
	Meningkatnya Kinerja dan Kualitas Pelayanan Pemerintah			Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Komponen Pelaporan (Nilai)		
				Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pemerintah Kota (Indeks)		
	Meningkatnya Tata Kelola dan Kinerja Perangkat Daerah			Indeks Kematangan Organisasi (Indeks)	4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah (Nilai)	4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (Indeks)	4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	



**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SAMARINDA**

TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
<i>(01)</i>	<i>(02)</i>	<i>(03)</i>	<i>(04)</i>	<i>(05)</i>	<i>(06)</i>	<i>(07)</i>
			Presentase Capaian Kinerja Program Sekretariat Daerah yang sesuai target	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Berita Acara)	4.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah (Data)	4.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Dokumen)	4.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	4.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun (Dokumen)	4.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	



**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SAMARINDA**

TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
				Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	4.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	4.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	4.01.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
				Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	4.01.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
				Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	4.01.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektorale Daerah (Dokumen)	4.01.01.2.01.0008 - Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektorale Daerah	



**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SAMARINDA**

TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
				Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah (Data)	4.01.01.2.01.0009 - Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	
				Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Berita Acara)	4.01.01.2.01.0010 - Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
				Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun (Dokumen)	4.01.01.2.01.0011 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD	
			Ketepatan Waktu Penyusunan Laporan Keuangan Sekretariat Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	4.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
				Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	4.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
				Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	4.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	



**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SAMARINDA**

TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
				Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	4.01.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
				Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	4.01.01.2.02.0002 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	
				Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	4.01.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Bagian Umum		Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	4.01.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
				Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	4.01.01.2.03.0005 - Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Bagian Umum		Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	4.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
				Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-	4.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat	



**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SAMARINDA**

TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
				Undangan (Orang)	Daerah	
				Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	4.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
				Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	4.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
				Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	4.01.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	
				Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	4.01.01.2.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	
				Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	4.01.01.2.05.0010 - Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	
				Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	4.01.01.2.05.0011 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	
			Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	4.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	



**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SAMARINDA**

TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
			Sekretariat Daerah	yang Disediakan (Dokumen)		
				Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	4.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
				Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	4.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	4.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
				Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	4.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
				Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	4.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
				Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	4.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
				Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	4.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
				Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang	4.01.01.2.06 - Administrasi Umum	



**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SAMARINDA**

TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
<i>(01)</i>	<i>(02)</i>	<i>(03)</i>	<i>(04)</i>	<i>(05)</i>	<i>(06)</i>	<i>(07)</i>
				Disediakan (Paket)	Perangkat Daerah	
				Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	4.01.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
				Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	4.01.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
				Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	4.01.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
				Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	4.01.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
				Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	4.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	
				Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	4.01.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	
				Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	4.01.01.2.06.0008 - Fasilitasi Kunjungan Tamu	
				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan	4.01.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan	



**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SAMARINDA**

TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
				Konsultasi SKPD (Laporan)	Konsultasi SKPD	
				Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	4.01.01.2.06.0010 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	
			Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	4.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
				Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan (Unit)	4.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
				Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan (Unit)	4.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
				Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	4.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
				Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	4.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
				Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	4.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	



**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SAMARINDA**

TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
				Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	4.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
				Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	4.01.01.2.07.0001 - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
				Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	4.01.01.2.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
				Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	4.01.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel	
				Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	4.01.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
				Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan (Unit)	4.01.01.2.07.0007 - Pengadaan Aset Tetap Lainnya	
				Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan (Unit)	4.01.01.2.07.0008 - Pengadaan Aset Tak Berwujud	
				Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	4.01.01.2.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
			Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Bagian Umum	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	4.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	



**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SAMARINDA**

TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
<i>(01)</i>	<i>(02)</i>	<i>(03)</i>	<i>(04)</i>	<i>(05)</i>	<i>(06)</i>	<i>(07)</i>
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	4.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	4.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	4.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	4.01.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	4.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	4.01.01.2.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	4.01.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	



**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SAMARINDA**

TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
<i>(01)</i>	<i>(02)</i>	<i>(03)</i>	<i>(04)</i>	<i>(05)</i>	<i>(06)</i>	<i>(07)</i>
			Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Sekretariat Daerah	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara (Unit)	4.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
				Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara (Unit)	4.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
				Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	4.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
				Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	4.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
				Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	4.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
				Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	4.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	



**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SAMARINDA**

TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
				Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	4.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
				Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	4.01.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
				Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	4.01.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
				Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	4.01.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
				Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara (Unit)	4.01.01.2.09.0007 - Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	
				Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara (Unit)	4.01.01.2.09.0008 - Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	
				Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang	4.01.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan	



**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SAMARINDA**

TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
				Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	Bangunan Lainnya	
				Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	4.01.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
			"Ketepatan Waktu Penyusunan Laporan Keuangan Sekretariat Daerah "	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Orang/Bulan)	4.01.01.2.11 - Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	
				Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Orang/Bulan)	4.01.01.2.11 - Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	
				Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Orang)	4.01.01.2.11 - Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	
				Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan (Paket)	4.01.01.2.11 - Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	



**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SAMARINDA**

TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
				Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Orang/Bulan)	4.01.01.2.11.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	
				Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan (Paket)	4.01.01.2.11.0002 - Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	
				Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Orang)	4.01.01.2.11.0003 - Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	
				Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Orang/Bulan)	4.01.01.2.11.0004 - Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	
			Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan (Paket)	4.01.01.2.12 - Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	
				Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan (Paket)	4.01.01.2.12 - Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	



**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SAMARINDA**

TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
				Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan (Paket)	4.01.01.2.12 - Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	
				Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan (Paket)	4.01.01.2.12.0001 - Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	
				Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan (Paket)	4.01.01.2.12.0002 - Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	
				Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan (Paket)	4.01.01.2.12.0003 - Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	
			Nilai Evaluasi Kelembagaan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan (Dokumen)	4.01.01.2.13 - Penataan Organisasi	
				Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan (Dokumen)	4.01.01.2.13.0001 - Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	
				Persentase PD yang mendapatkan Hasil Evaluasi AKIP \geq 70 (BB)	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah (Dokumen)	4.01.01.2.13 - Penataan Organisasi



**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SAMARINDA**

TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
				Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi (Dokumen)	4.01.01.2.13 - Penataan Organisasi	
				Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi (Dokumen)	4.01.01.2.13.0003 - Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	
				Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah (Dokumen)	4.01.01.2.13.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	
			Persentase Unit Kerja yang mendapatkan Indeks Kepuasan Masyarakat \geq 88.31 (Sangat Baik)	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana (Dokumen)	4.01.01.2.13 - Penataan Organisasi	
				Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana (Laporan)	4.01.01.2.13 - Penataan Organisasi	
				Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana (Laporan)	4.01.01.2.13.0002 - Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	
				Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan	4.01.01.2.13.0004 - Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan	



**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SAMARINDA**

TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
				Tata Laksana (Dokumen)	Tata Laksana	
			Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan (Laporan)	4.01.01.2.14 - Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	
				Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan (Laporan)	4.01.01.2.14 - Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	
				Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan (Laporan)	4.01.01.2.14 - Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	
				Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan (Laporan)	4.01.01.2.14.0001 - Fasilitasi Keprotokolan	
				Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan (Laporan)	4.01.01.2.14.0002 - Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	
				Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan (Laporan)	4.01.01.2.14.0003 - Pendokumentasian Tugas Pimpinan	
	Meningkatnya Kualitas Kebijakan Pemerintah			Indeks Kualitas Kebijakan (IKK) (Indeks)		
		Meningkatnya kinerja penyelenggaraan daerah bidang		Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) (Nilai)	4.01.02 - PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	



**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SAMARINDA**

TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
		pemerintahan dan kesejahteraan rakyat				
				Persentase Tindak Lanjut Kebijakan Urusan Kesejahteraan Rakyat Hasil Fasilitasi (%)	4.01.02 - PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	
				Indeks Reformasi Hukum (Indeks)	4.01.02 - PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	
				Persentase Perjanjian Kerja Sama yang Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah (%)	4.01.02 - PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	
			Persentase Peningkatan Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah (Dokumen)	4.01.02.2.01 - Administrasi Tata Pemerintahan	
				Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan (Dokumen)	4.01.02.2.01 - Administrasi Tata Pemerintahan	
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan (Dokumen)	4.01.02.2.01 - Administrasi Tata Pemerintahan	
				Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan (Dokumen)	4.01.02.2.01.0001 - Penataan Administrasi Pemerintahan	



**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SAMARINDA**

TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan (Dokumen)	4.01.02.2.01.0002 - Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	
				Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah (Dokumen)	4.01.02.2.01.0003 - Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	
			Persentase Pelaksanaan Kebijakan Urusan Kesejahteraan Rakyat yang di fasilitasi	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual (Dokumen)	4.01.02.2.02 - Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	
				Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas (Dokumen)	4.01.02.2.02 - Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	



**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SAMARINDA**

TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
				Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB (Dokumen)	4.01.02.2.02 - Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	
				Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat (Keluarga)	4.01.02.2.02 - Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	
				Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya	4.01.02.2.02 - Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	



**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SAMARINDA**

TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
				Saing (Keluarga)		
				Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual (Dokumen)	4.01.02.2.02.0001 - Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	
				Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB (Dokumen)	4.01.02.2.02.0002 - Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	



**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SAMARINDA**

TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
				Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas (Dokumen)	4.01.02.2.02.0003 - Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	
				Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat (Keluarga)	4.01.02.2.02.0004 - Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	
				Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing (Keluarga)	4.01.02.2.02.0006 - Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	
			Persentase Produk Hukum yang difasilitasi dan diharmonisasi	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum (Kasus)	4.01.02.2.03 - Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	



**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SAMARINDA**

TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
				Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun (Dokumen)	4.01.02.2.03 - Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	
				Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi (Dokumen)	4.01.02.2.03 - Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	
				Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun (Dokumen)	4.01.02.2.03.0001 - Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	
				Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum (Kasus)	4.01.02.2.03.0002 - Fasilitasi Bantuan Hukum	
				Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi (Dokumen)	4.01.02.2.03.0003 - Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	
			Persentase Efektivitas Kerja Sama Daerah dengan Formulasi: Jumlah Kerja Sama yang berjalan efektif (tepat output, waktu, manfaat) / Jumlah total kerja sama yang ditanda tangani X 100%	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri (Dokumen)	4.01.02.2.04 - Fasilitasi Kerja Sama Daerah	



**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SAMARINDA**

TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
				Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri (Dokumen)	4.01.02.2.04 - Fasilitasi Kerja Sama Daerah	
				Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama (Laporan)	4.01.02.2.04 - Fasilitasi Kerja Sama Daerah	
				Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri (Dokumen)	4.01.02.2.04.0001 - Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	
				Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri (Dokumen)	4.01.02.2.04.0002 - Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	
				Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama (Laporan)	4.01.02.2.04.0003 - Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	
		Meningkatnya kinerja penyelenggaraan daerah bidang Perekonomian dan Pembangunan		Tingkat Inflasi (%)	4.01.03 - PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	
				Persentase Capaian Target Program Prioritas Pembangunan Daerah (%)	4.01.03 - PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	
				Indeks Tata Kelola Pengadaan (Indeks)	4.01.03 - PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	
				Persentase Tindaklanjut Kebijakan Urusan Sumber Daya Alam	4.01.03 - PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	



**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SAMARINDA**

TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
				(SDA) Hasil Fasilitas (%)		
			Persentase Kegiatan Fasilitas Kebijakan Urusan Perekonomian yang ditindaklanjuti	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan BLUD (Dokumen)	4.01.03.2.01 - Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	
				Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD (Dokumen)	4.01.03.2.01 - Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	
				Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil (Dokumen)	4.01.03.2.01 - Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	
				Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian (Laporan)	4.01.03.2.01 - Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	
				Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD (Dokumen)	4.01.03.2.01.0001 - Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	
				Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	4.01.03.2.01.0002 - Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	



**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SAMARINDA**

TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
				(Laporan)		
				Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil (Dokumen)	4.01.03.2.01.0003 - Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	
				Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan BLUD (Dokumen)	4.01.03.2.01.0004 - Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan BLUD	
			Persentase Realisasi Fisik Yang Berkualitas	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah (Dokumen)	4.01.03.2.02 - Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	
				Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan (Laporan)	4.01.03.2.02 - Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	
				Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan (Laporan)	4.01.03.2.02 - Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	
				Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah (Dokumen)	4.01.03.2.02.0001 - Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	
				Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan (Laporan)	4.01.03.2.02.0002 - Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	



**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SAMARINDA**

TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
				Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan (Laporan)	4.01.03.2.02.0003 - Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	
			Tingkat Kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ)	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik (Dokumen)	4.01.03.2.03 - Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa (Dokumen)	4.01.03.2.03 - Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	
				Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa (Orang)	4.01.03.2.03 - Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa (Dokumen)	4.01.03.2.03.0001 - Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	
				Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik (Dokumen)	4.01.03.2.03.0002 - Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	
				Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa (Orang)	4.01.03.2.03.0003 - Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	



**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SAMARINDA**

TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
			Persentase Pelaksanaan Kebijakan Urusan Sumber Daya Alam (SDA)	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan (Dokumen)	4.01.03.2.04 - Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	
				Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian (Dokumen)	4.01.03.2.04 - Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	
				Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja (Dokumen)	4.01.03.2.04 - Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	



**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SAMARINDA**

TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
				Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja (Dokumen)	4.01.03.2.04.0001 - Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	
				Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian (Dokumen)	4.01.03.2.04.0002 - Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	
				Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan (Dokumen)	4.01.03.2.04.0003 - Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	

Sumber: RENSTRA SEKRETARIAT DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2025-2029



B. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagai Kepala Daerah dalam merumuskan kebijakan, melakukan pembinaan, dan mengkoordinasikan Dinas/Badan, Lembaga Teknis Daerah, serta Lembaga Daerah, tingkat pencapaian kinerja Perangkat Daerah dapat diukur dengan menggunakan indikator-indikator tertentu.

Secara garis besar, evaluasi Capaian Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah Kota Samarinda dapat dianalisis melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan. IKU merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama organisasi sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kota Samarinda. Seiring dengan ditetapkannya Rencana Strategis (Renstra) terbaru, terdapat penyesuaian dan perubahan pada IKU Tahun 2025 agar selaras dengan arah kebijakan, sasaran strategis, serta prioritas pembangunan daerah yang baru. Penyesuaian tersebut dilakukan untuk memastikan keterkaitan yang konsisten antara dokumen perencanaan strategis dan pengukuran kinerja, sehingga capaian kinerja Sekretariat Daerah dapat diukur secara lebih relevan, akuntabel, dan berorientasi hasil. Penjelasan lebih rinci mengenai perubahan dan capaian indikator tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.



Tabel 2.3
Indikator Kinerja Utama

No	Tujuan OPD	Indikator Tujuan OPD	Sasaran OPD	Indikator Sasaran OPD	Program OPD	Indikator Program	Satuan	Penjelasan / Formulasi	Penanggung Jawab																		
1	Terciptanya Tatanan Birokrasi Yang Transparan, Akuntabel, Responsive, Efektif	Nilai IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)	Meningkatnya Kinerja Pelayanan OPD	Nilai IKM	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota	Nilai IKM	Nilai	$IKM = \frac{\text{Total dari Nilai Persepsi Per Unsar}}{\text{Total unsur yang terisi}} \times \text{Nilai Penimbang}$	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagian Perencanaan dan Keuangan 2. Bagian Umum 3. Bagian Organisasi 4. Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan 																		
		Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)	Terwujudnya Peningkatan yang Efektif, Efisien serta Akuntabel Dalam Memfasilitasi Fungsi Walikota, Wakil Walikota dan Sekretaris Daerah	Nilai LPPD	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Nilai LPPD	Nilai	<p>Nilai Evaluasi LPPD ditentukan oleh Permendagri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>NO</th> <th>SKOR KINERJA</th> <th>STATUS KINERJA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>0.00 – 1.80</td> <td>Sangat Rendah</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>1.81 – 2.60</td> <td>Rendah</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>2.61 – 3.40</td> <td>Sedang</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>3.41 – 4.20</td> <td>Tinggi</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>4.21 – 5.00</td> <td>Sangat Tinggi</td> </tr> </tbody> </table>	NO	SKOR KINERJA	STATUS KINERJA	1	0.00 – 1.80	Sangat Rendah	2	1.81 – 2.60	Rendah	3	2.61 – 3.40	Sedang	4	3.41 – 4.20	Tinggi	5	4.21 – 5.00	Sangat Tinggi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagian Tata Pemerintahan 2. Bagian Kesejahteraan Masyarakat 3. Bagian Hukum 4. Bagian Kerja Sama
		NO	SKOR KINERJA	STATUS KINERJA																							
1	0.00 – 1.80	Sangat Rendah																									
2	1.81 – 2.60	Rendah																									
3	2.61 – 3.40	Sedang																									
4	3.41 – 4.20	Tinggi																									
5	4.21 – 5.00	Sangat Tinggi																									
Program Perekonomian Pembangunan			Nilai Inflasi	Nilai	$\Delta Inf = \frac{IHK_{(n)} - IHK_{(n-1)}}{IHK_{(n-1)}} \times 100\%$	<ol style="list-style-type: none"> 1. BBagian Perekonomian 2. Bagian Pembangunan 3. Bagian Barang Jasa 4. Bagian SDA 																					

Sumber : IKU 2025



**Tabel 2.4
Perubahan Indikator Kinerja Utama**

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Dasar Hukum	Definis Operasional	Formulasi	Sumber Data
1	Meningkatnya Kinerja dan Kualitas Pelayanan Pemerintah	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Komponen Pelaporan	Nilai	Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) PermenPANRB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Perwali Nomor 11 Tahun 2024	Nilai yang diperoleh pemerintah daerah berdasarkan hasil evaluasi Kementerian PANRB terhadap pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), khusus pada komponen pelaporan. Penilaian mencakup kelengkapan, kualitas, dan konsistensi laporan kinerja sesuai ketentuan dalam PermenPANRB Nomor 88 Tahun 2021. Evaluasi dilakukan setiap tahun untuk mengukur sejauh mana instansi melaksanakan prinsip akuntabilitas kinerja.	Nilai Hasil Evaluasi AKIP Pemerintah Komponen Pelaporan	LHE Kemenpan RB
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pemerintah Kota	Indeks		Nilai yang mencerminkan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik yang diberikan oleh perangkat daerah dilingkungan Pemerintah Kota. Indeks dihitung berdasarkan survei persepsi masyarakat terhadap aspek kecepatan, ketepatan, kenyamanan, kemudahan dan kualitas layanan sesuai ketentuan peraturan Menteri PANRB tentang pedoman Survei Kepuasan Masyarakat.	Nilai IKM Pemkot = Jumlah Nilai IKM Perangkat Daerah atau Unit Kerja / Jumlah Perangkat Daerah	Aplikasi e-KIANPUAS Bagian Organisasi
2	Meningkatnya Kualitas Kebijakan Pemerintah	Indeks Kualitas Kebijakan (IKK)	Indeks		Nilai yang menggambarkan kualitas penyusunan kebijakan pemerintah daerah berdasarkan kriteria partisipasi publik, transparansi, berbasis data, efektivitas, dan dampak kebijakan. Penilaian dilakukan oleh Lembaga Administrasi Negara (LAN) melalui metode evaluasi kebijakan yang terstandar, dengan tujuan meningkatkan mutu perumusan kebijakan daerah.	Nilai Hasil Evaluasi Kebijakan	LHE LAN

Sumber : IKU 2025



C. Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Dengan telah diterbitkannya Inpres RI Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, kemudian Sekretariat Daerah Kota Samarinda menindaklanjuti dengan menyusun dan menetapkan dalam Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2025 sebagaimana dalam Peraturan Menteri PAN dan RB nomor 53 Tahun 2014. Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu 1 (satu) tahun dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Tujuan khusus Perjanjian Kinerja antara lain : untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur .

Perjanjian Kinerja Sekretariat Daerah Kota Samarinda Tahun 2025 pada awalnya disusun berdasarkan dokumen perencanaan yang berlaku pada saat penetapan (Perjanjian Kinerja murni), dengan mengacu pada Rencana Kinerja Tahunan serta APBD Tahun Anggaran 2025. Dokumen tersebut menjadi dasar pelaksanaan, pengukuran, dan pelaporan kinerja selama tahun berjalan.

Seiring dengan berjalannya pelaksanaan program dan kegiatan serta ditetapkannya Rencana Strategis (Renstra) terbaru, terdapat penyesuaian terhadap arah kebijakan, sasaran strategis, dan indikator kinerja perangkat daerah. Untuk menjaga konsistensi dan keterpaduan antara dokumen perencanaan jangka menengah dan dokumen perencanaan tahunan, maka dilakukan perubahan terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2025.

Perubahan Perjanjian Kinerja tersebut dimaksudkan untuk menyelaraskan indikator dan target kinerja dengan indikator yang telah ditetapkan dalam Renstra terbaru, sehingga pengukuran dan pelaporan kinerja perangkat daerah tetap relevan, terukur, dan akuntabel. Penyesuaian ini juga bertujuan untuk memastikan bahwa pelaksanaan kinerja Sekretariat Daerah Kota Samarinda mendukung pencapaian sasaran strategis sebagaimana tertuang dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah.



Perjanjian Kinerja Setda Kota Samarinda Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.5
Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
Meningkatnya Kinerja Pelayanan OPD	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	88
Terwujudnya Peningkatan yang Efektif, Efisien serta Akuntabel dalam Memfasilitasi Fugsi Walikota, wakil Walikota dan Sekretaris Daerah	Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)	Nilai	3.45
	Angka Nilai Inflasi Daerah	Nilai	3

Sumber: Perjanjian Kinerja Setda Kota Samarinda Th. 2025

Tabel 2.6
Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
Sasaran: Meningkatkan Kinerja dan Kualitas Pelayanan Pemerintah	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Komponen Pelaporan	Nilai	11.75
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pemerintah Kota	Indeks	90.1
Meningkatnya Kualitas Kebijakan Pemerintah	Indeks Kualitas Kebijakan (IKK)	Indeks	50

Sumber: Perubahan Perjanjian Kinerja Setda Kota Samarinda Th.2025

1. Rencana Anggaran Tahun 2025

Pada Tahun 2025, Sekretariat Daerah Kota Samarinda melaksanakan kegiatan dengan anggaran sebesar Rp. 141.389.763.276,- dengan rincian Belanja Operasi Rp. 110.255.372.748,- dan Belanja Modal Rp. 31.134.390.528,-. Adapun realisasi anggaran sebesar Rp. 129.971.719.739,- dengan rincian Belanja Operasi Rp.101.042.698.740,- dan Belanja Modal Rp.28.929.020.999,-.



2. Target Belanja Setda Kota Samarinda Tahun 2025

Target Belanja Sekretariat Daerah Kota Samarinda Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.7
Target Belanja Sekretariat Daerah Kota Samarinda
Tahun 2025

No	Sasaran Strategis/ Program	Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Capaian %
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	97.666.336.346	88.045.763.225	90.15
2	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	39.347.273.351	37.928.479.814	96.39
3	Program Perekonomian dan Pembangunan	4.376.153.579	3.997.476.700	91.36

Sumber: Laporan Realisasi APBD Tahun 2025



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah

Sekretariat Daerah Kota Samarinda selaku pelaksanaan administratif pemerintahan Kota Samarinda melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Daerah Kota Samarinda yang dibuat sesuai dengan ketentuan yang terkandung dalam Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan tersebut diatas memberikan gambaran mengenai tingkat pencapaian Sasaran dan Program/Kegiatan, baik keberhasilan-keberhasilan kinerja yang telah dicapai maupun kegagalan pada tahun 2025.

A. LAPORAN HASIL EVALUASI ATAS IMPLEMENTASI AKIP TAHUN SEBELUMNYA

1. Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja

Nilai hasil evaluasi akuntabilitas kinerja Sekretariat Daerah Kota Samarinda 4 (tiga) tahun terakhir dapat dilihat pada tabel 3.1 berikut ini:



Tabel 3.1
Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Tahun 2021-2024

NO	Komponen yang dinilai	Nilai Tahun				Peningkatan/Penurunan capaian 2021-2023
		2021	2022	2023	2024	
1.	Perencanaan Kinerja	49,25	19,37	21,50	22,5	+1
2	Pengukuran Kinerja	14,50	14,45	14,50	20,5	+6
3	Pelaporan Kinerja	7,20	8,05	7,75	11,75	-4
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	9,50	10,00	12,50	18,5	+6
Nilai Hasil Evaluasi AKIP		49,25	51,87	56,25	73,25	+17
Kategori Penilaian		C	CC	CC	BB	

Sumber: Laporan Hasil Evaluasi AKIP Sekretariat Daerah Kota Samarinda

2. Tindak Lanjut atas Hasil Evaluasi Inspektorat Kota Samarinda

Tindak lanjut terhadap rekomendasi dalam Laporan Hasil Evaluasi (LHE) atas implementasi SAKIP Tahun 2024 pada Sekretariat Daerah Kota Samarinda dapat dilihat penjelasannya pada tabel 3.2 berikut ini:

Tabel 3.2
Rekomendasi, Tindak Lanjut dan Rencana Aksi

No.	Rekomendasi	Tindak Lanjut / Rencana Aksi	Sudah / Belum
Perencanaan Kinerja			
1	Kualitas rumusan hasil (tujuan/sasaran) belum sepenuhnya menggambarkan kondisi kinerja yang akan dicapai	Kualitas rumusan hasil (tujuan/sasaran) sepenuhnya menggambarkan kondisi kinerja yang akan dicapai	Sudah
2	Aktivitas yang dilaksanakan belum mendukung kinerja triwulan yang ingin dicapai	Aktivitas yang dilaksanakan mendukung kinerja triwulan yang ingin dicapai	Sudah
3	Rencana aksi kinerja berjalan dinamis karena capaian kinerja belum dipantau secara berkala	Rencana aksi kinerja berjalan dinamis karena capaian kinerja dipantau secara berkala	Sudah
4	Terdapat perbaikan/penyempurnaan dokumen perencanaan kinerja yang ditetapkan dari hasil analisis perbaikan kinerja sebelumnya dalam mewujudkan kondisi yang lebih baik	Terdapat perbaikan/penyempurnaan dokumen perencanaan kinerja yang ditetapkan dari hasil analisis perbaikan kinerja sebelumnya dalam mewujudkan kondisi yang lebih baik	Sudah
Pengukuran Kinerja			
1	Data kinerja yang dikumpulkan belum relevan dan mendukung	Data kinerja yang dikumpulkan relevan dan mendukung untuk mengukur capaian	Sudah



	untuk mengukur capaian kinerja yang diharapkan	kinerja yang diharapkan	
2	Setiap unit dan sub unit memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja	Setiap unit dan sub unit memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja	Sudah
	Pelaporan Kinerja		
1	Dokumen Laporan kinerja menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level Provinsi/Nasional	Dokumen Laporan kinerja menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level Provinsi/Nasional	Sudah
2	Penyajian informasi dalam Laporan kinerja belum menjadi kepedulian seluruh pegawai	Penyajian informasi dalam kinerja menjadi kepedulian seluruh pegawai	Sudah
	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal		
1	Evaluasi akuntabilitas kinerja belum sepenuhnya dilaksanakan oleh sumber daya manusia (SDM) yang memadai	Evaluasi akuntabilitas kinerja dilaksanakan oleh sumber daya manusia (SDM) yang memadai	Sudah

Sekretariat Daerah Kota Samarinda telah melakukan hal-hal yang patut dijadikan pertimbangan dalam peningkatan kinerjanya. Hal rutin dimaksud berkaitan dengan SAKIP yakni Monitoring dan Evaluasi Rencana Aksi Triwulan I, II, III, dan IV.

Sekretariat Daerah Kota Samarinda secara rutin juga melaksanakan Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) dimulai dari Rancangan Awal (Ranwal) hingga Rancangan Akhir (Ranhir) RENJA Sekretariat Daerah Kota Samarinda, hal ini sesuai dengan tahapan dalam penyusunan RENJA Perangkat Daerah yang berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah, tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

B. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pengukuran capaian kinerja Sekretariat Daerah Kota Samarinda Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut ini:



Tabel 3.3
Pengukuran Kinerja Tahun 2025

No	Sasaran	Indikator	Satuan	Target Tahunan	Realisasi	%
1	Meningkatnya Kinerja dan Pelayanan OPD	Nilai IKM	Nilai	88	88,29	100,33
2	Terwujudnya Peningkatan yang efektif, efisien serta akuntabel dalam memfasilitasi fungsi Walikota, Wakil Walikota dan Sekretaris Daerah	Nilai LPPD	Nilai	3,45	3,45	100
		Angka Nilai Inflasi Daerah	Nilai	3	1,50	100

Sumber : data diolah.

Tabel 3.4
Perubahan Pengukuran Kinerja Tahun 2025

No	Sasaran	Indikator	Satuan	Target Tahunan	Realisassi	%
1	Meningkatnya Kinerja dan Kualitas Pelayanan Pemerintah	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Komponen Pelaporan	Nilai	11.75	11.08	94.30
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pemerintah Kota	Indeks	90.1	91.2	101.22
2	Meningkatnya Kualitas Kebijakan Pemerintah	Indeks Kualitas Kebijakan (IKK)	Indeks	50	85.10	170.2

Sumber: data diolah.

C. ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Sekretariat Daerah Kota Samarinda telah melaksanakan penilaian kinerja dengan mengacu pada Penetapan Kinerja Tahun 2025. Penilaian ini dilakukan untuk mengevaluasi dan mengukur kinerja yang hasilnya akan memberikan gambaran keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran. Sesuai dengan PermenPAN-RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, pengukuran capaian kinerja dilakukan antara lain dengan cara sebagai berikut :

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir



3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi
4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dan akan dilakukan
5. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya
6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Sesuai laporan Perjanjian Kinerja (PK) dan Indikator Kinerja Utama yang tertuang pada dokumen RENSTRA Sekretariat Daerah Kota Samarinda 2025 - 2029 yang telah juga diselaraskan dengan dokumen RPJMD Kota Samarinda Tahun 2025 - 2029 maka Sekretariat Daerah Kota Samarinda memiliki dua sasaran yaitu **1. "Meningkatnya Kinerja dan Kualitas Pelayanan Pemerintah"** dan **2. "Meningkatnya Kualitas Kebijakan Pemerintah"**. Dengan sasaran capaian program tersebut maka dapat dijabarkan capaian sasaran untuk membandingkan target dan realisasi kinerja tahun ini dengan realisasi kinerja dengan tahun sebelumnya sebagai berikut :

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun 2025

Tabel 3.5 Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian
1	2	3	4	5	6
1.	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Komponen Pelaporan	Nilai	11.75	11.08	94.30
2.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pemerintah Kota	Indeks	90.1	91.2	101.22
3.	Indeks Kualitas Kebijakan (IKK)	Indeks	50	85.10	170.2

Sumber : Data diolah



2. **Membandingkan Antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun ini dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir**

Tabel 3.6 Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun ini dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi			
			2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	
1	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Komponen Pelaporan	Nilai	10.71	10.76	11.16	11.08
2	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pemerintah Kota	Indeks	87.00	87.01	89.07	91.2
3.	Indeks Kualitas Kebijakan (IKK)	Indeks	N/A	13.77	13.77	85.10

Sumber : Data diolah

3. **Membandingkan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun Ini Dengan Target RPJMD/Renstra**

Tabel 3.7 Realisasi Kinerja dan Target Akhir RPJMD/Renstra

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target Akhir RPJMD / RENSTRA	Realisasi	Tingkat Capaian Target
1	2	3	4	5	6
1	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Komponen Pelaporan	Nilai	14.75	11.08	94.30
2	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pemerintah Kota	Indeks	95.5	91.2	101.22
3.	Indeks Kualitas Kebijakan (IKK)	Indeks	65	85.10	170.2

Sumber : Data diolah



4. Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Standar Nasional

Dalam rangka menilai posisi capaian kinerja daerah secara objektif, perlu dilakukan perbandingan antara realisasi kinerja Tahun 2025 dengan standar nasional yang berlaku pada masing-masing indikator. Namun demikian, tidak seluruh indikator memiliki standar nasional dalam bentuk angka baku yang dapat dibandingkan secara langsung.

Pada indikator Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Komponen Pelaporan, pengukuran mengacu pada sistem evaluasi nasional yang dilaksanakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Penilaian AKIP pada dasarnya menggunakan kategori nilai (CC, B, BB, A, AA) berdasarkan akumulasi seluruh komponen sistem akuntabilitas kinerja, bukan menetapkan standar angka minimal pada masing-masing komponen secara terpisah. Dengan demikian, tidak terdapat standar nasional berupa angka baku khusus untuk komponen pelaporan yang dapat dijadikan pembanding langsung. Capaian sebesar 11,08 menunjukkan kualitas pelaporan yang telah memenuhi kaidah sistem akuntabilitas kinerja, meskipun masih memerlukan penguatan untuk mencapai nilai optimal pada evaluasi secara keseluruhan.

Pada indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), pengukuran mengacu pada pedoman nasional yang ditetapkan melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Survei Kepuasan Masyarakat. Dalam pedoman tersebut telah ditetapkan klasifikasi mutu pelayanan secara nasional, di mana nilai 88,31–100 termasuk dalam kategori A (Sangat Baik). Dengan realisasi sebesar 91,2, capaian IKM Tahun 2025 berada dalam kategori “Sangat Baik” dan telah memenuhi bahkan melampaui standar mutu pelayanan publik secara nasional. Oleh karena itu, indikator ini dapat dibandingkan secara langsung dengan standar nasional yang berlaku.

Sementara itu, pada indikator Indeks Kualitas Kebijakan (IKK), pengukuran dilakukan menggunakan pendekatan indeks dengan skala nilai 0–100 untuk menilai kualitas proses perumusan dan evaluasi kebijakan. Secara nasional, tidak terdapat ketentuan angka minimal yang bersifat wajib sebagai standar universal. Penilaian umumnya bersifat komparatif dan interpretatif, di mana nilai di atas 80 secara umum dikategorikan sangat baik dalam praktik tata kelola kebijakan. Dengan realisasi sebesar 85,10, capaian Tahun 2025 menunjukkan bahwa kualitas kebijakan daerah



telah berada pada kategori sangat baik dan mencerminkan kematangan proses perumusan kebijakan.

Secara keseluruhan, dari tiga indikator kinerja utama tersebut, hanya Indeks Kepuasan Masyarakat yang memiliki standar nasional kuantitatif yang secara eksplisit dapat dijadikan pembandingan langsung. Sementara itu, indikator AKIP dan IKK menggunakan pendekatan evaluatif dan kategorikal yang lebih menekankan pada peningkatan kualitas dan benchmarking antar instansi. Meskipun demikian, capaian Tahun 2025 menunjukkan bahwa kinerja daerah telah berada pada tingkat yang baik dan kompetitif dalam kerangka tata kelola pemerintahan secara nasional.

5. Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan Atau Peningkatan / Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Akan Dilakukan

1) Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Indikator Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Komponen Pelaporan memiliki target 11.75 dengan realisasi 11.08 (94.30%). hal ini menunjukkan bahwa realisasi indikator ini berada sedikit di bawah target yang ditetapkan, dengan selisih 0,67 poin. Persentase capaian sebesar 94,30% menunjukkan bahwa kualitas pelaporan kinerja telah dilaksanakan dengan baik, namun masih terdapat ruang perbaikan. Meskipun belum mencapai target 100%, capaian ini tetap menunjukkan kinerja yang baik dan berada pada kategori tinggi.

Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pemerintah Kota memiliki target 90.1 dengan realisasi 91.2 (101.22%). Hal ini menunjukkan bahwa pencapaian yang baik dengan realisasi IKM melampaui target sebesar 1,1 poin dengan persentase capaian 101,22%. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas pelayanan publik yang dikoordinasikan oleh Sekretariat Daerah telah memenuhi bahkan melampaui ekspektasi masyarakat. Pencapaian ini mencerminkan peningkatan standar pelayanan, perbaikan mekanisme pengaduan dan respons layanan serta penguatan budaya pelayanan prima di lingkungan perangkat daerah. Capaian di atas 100% mengindisikan efektivitas strategi peningkatan kualitas pelayanan yang telah diterapkan selama Tahun 2025

Indikator Indeks Kualitas Kebijakan (IKK) memiliki target 50 dengan realisasi 85.10 (170.2%), capaian Indeks Kualitas Kebijakan (IKK) Tahun 2025



menunjukkan performa yang sangat optimal. Realisasi sebesar 85,10 dari target 50 mencerminkan peningkatan signifikan dalam tata kelola kebijakan daerah, baik dari sisi proses maupun kualitas substansi. Keberhasilan ini menjadi fondasi penting dalam mendukung terwujudnya kebijakan daerah yang adaptif, responsif, dan berorientasi pada hasil.

2) Perbandingan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun ini dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

Berdasarkan tabel 3.5, indikator Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Komponen Pelaporan menunjukkan bahwa pada tahun 2025 mengalami penurunan sebesar 0,08 poin dibandingkan Tahun 2024 (11,16 menjadi 11,08). Secara persentase, penurunan ini relatif kecil dan tidak menunjukkan penurunan yang signifikan secara substansial. Penurunan tipis ini dapat disebabkan oleh faktor teknis dalam evaluasi, seperti pendalaman kualitas narasi analisis kinerja, konsistensi data dukung, atau penyempurnaan sistem pengukuran yang semakin ketat.

Secara tren jangka menengah, nilai AKIP menunjukkan peningkatan dari 10,71 (2022) menjadi 11,08 (2025). Artinya, secara kumulatif terjadi kenaikan sebesar 0,37 poin dalam empat tahun terakhir. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat sedikit fluktuasi tahunan, kualitas akuntabilitas kinerja secara umum berada dalam tren meningkat dan relatif stabil. Sistem pelaporan kinerja dapat dikategorikan telah memasuki fase konsolidasi dan pematangan.

Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada tahun 2025 menunjukkan peningkatan sebesar 2,13 poin dibandingkan Tahun 2024. Ini merupakan kenaikan yang cukup signifikan dalam satu tahun anggaran. Kenaikan tersebut menunjukkan adanya peningkatan kualitas pelayanan publik yang lebih nyata dibandingkan tahun sebelumnya, baik dari sisi standar pelayanan, kecepatan layanan, kemudahan prosedur, maupun kepuasan pengguna layanan.

Dalam kurun empat tahun terakhir, IKM meningkat dari 87,00 menjadi 91,2, atau naik sebesar 4,2 poin. Tren ini menunjukkan peningkatan yang konsisten dan progresif setiap tahunnya, tanpa adanya penurunan. Hal ini mengindikasikan bahwa reformasi pelayanan publik berjalan secara



berkelanjutan dan memberikan dampak positif yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Indikator ini menjadi salah satu capaian yang menunjukkan performa paling stabil dan meningkat secara konsisten.

Indikator Indeks Kualitas Kebijakan (IKK) pada tahun 2025 menunjukkan lonjakan yang sangat signifikan dibandingkan Tahun 2024, dengan kenaikan sebesar 71,33 poin (dari 13,77 menjadi 85,10). Perubahan drastis ini menunjukkan adanya transformasi mendasar dalam tata kelola kebijakan daerah. Peningkatan tersebut dapat dikaitkan dengan penguatan proses perumusan kebijakan berbasis data, peningkatan koordinasi dan harmonisasi digital, penyempurnaan metodologi penilaian kualitas kebijakan dan integrasi kebijakan dengan dokumen perencanaan strategis terbaru.

Dalam beberapa tahun terakhir pada fase awal (2023–2024), nilai IKK stagnan di angka 13,77, yang mengindikasikan bahwa sistem pengukuran dan kualitas kebijakan masih dalam tahap awal pengembangan. Tahun 2025 menjadi titik balik (turning point) dengan peningkatan yang sangat signifikan. Kenaikan ini tidak hanya menunjukkan peningkatan capaian, tetapi juga mencerminkan adanya kematangan sistem, peningkatan kapasitas aparatur, serta perbaikan siklus kebijakan yang lebih komprehensif (perencanaan–pelaksanaan–evaluasi).

Secara keseluruhan, periode 2022–2025 memperlihatkan tren kinerja yang progresif, dengan penguatan pada aspek akuntabilitas, pelayanan publik, dan kualitas kebijakan. Hal ini menunjukkan bahwa sistem manajemen kinerja dan tata kelola pemerintahan semakin efektif dan terarah menuju peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berkelanjutan.

3) Perbandingan antara realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target RPJMD Kota Samarinda

Dari tabel 3.6 dapat dilihat pada indikator Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Komponen Pelaporan target akhir RPJMD/Renstra 14,75 dengan realisasi tahun 2025 yaitu 11,08. Secara nominal, realisasi Tahun 2025 masih berada di bawah target akhir RPJMD/Renstra dengan selisih sebesar 3,67 poin. Hal ini menunjukkan bahwa



masih diperlukan upaya peningkatan kualitas pelaporan kinerja agar dapat mencapai target jangka menengah yang telah ditetapkan.

Meskipun demikian, tingkat capaian sebesar 94,30% menunjukkan bahwa kinerja pada komponen ini telah berada pada jalur yang cukup baik dan mendekati ekspektasi perencanaan. Dengan tren peningkatan dalam beberapa tahun terakhir, terdapat peluang yang realistis untuk mencapai target akhir apabila dilakukan penguatan pada aspek Konsistensi keterkaitan perencanaan dan penganggaran, Pendalaman analisis capaian dalam laporan kinerja, dan Optimalisasi tindak lanjut atas hasil evaluasi internal dan eksternal. Indikator ini dapat dikategorikan sebagai progresif namun belum optimal, sehingga memerlukan strategi akselerasi pada periode berikutnya.

Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) target akhir RPJMD/Renstra 95,5 dengan realisasi tahun 2025 yaitu 91,2 menunjukkan bahwa secara nominal masih terdapat selisih 4,3 poin dari target akhir 95,5. Namun demikian, tingkat capaian tahunan sebesar 101,22% mengindikasikan bahwa target kinerja Tahun 2025 telah terlampaui. Hal ini menunjukkan bahwa secara bertahap organisasi bergerak menuju target akhir RPJMD/Renstra. Dengan tren peningkatan yang konsisten selama empat tahun terakhir, indikator ini berada dalam posisi yang sangat baik untuk mencapai target jangka menengah.

Peningkatan kualitas pelayanan publik yang berkelanjutan menjadi faktor utama keberhasilan ini, termasuk perbaikan standar pelayanan, transparansi prosedur, serta peningkatan respons terhadap kebutuhan masyarakat. Indikator ini dapat dikategorikan sebagai on track dan progresif, dengan prospek pencapaian target akhir yang cukup kuat apabila tren peningkatan dapat dipertahankan.

Indikator Indeks Kualitas Kebijakan (IKK) target akhir RPJMD/Renstra 65 dengan realisasi tahun 2025 yaitu 85,10 menunjukkan capaian yang sangat signifikan. Realisasi Tahun 2025 telah melampaui target akhir RPJMD/Renstra sebesar 20,10 poin. Persentase capaian sebesar 170,2% mengindikasikan bahwa kinerja telah jauh melebihi ekspektasi perencanaan jangka menengah.

Capaian ini mencerminkan adanya transformasi mendasar dalam proses perumusan, harmonisasi, dan evaluasi kebijakan daerah. Penguatan analisis kebijakan berbasis data, peningkatan koordinasi lintas perangkat daerah, serta



integrasi kebijakan dengan dokumen perencanaan strategis menjadi faktor pendorong utama. Indikator ini dapat dikategorikan sebagai sangat optimal dan melampaui ekspektasi jangka menengah.

Secara keseluruhan, capaian kinerja Tahun 2025 menunjukkan bahwa sebagian besar indikator strategis berada dalam kondisi progresif bahkan melampaui target jangka menengah. Hal ini mencerminkan efektivitas pelaksanaan Renstra serta semakin matangnya sistem manajemen kinerja dan tata kelola pemerintahan daerah.

4) Faktor pendukung keberhasilan/kegagalan capaian kinerja

➤ **Nilai Hasil Evaluasi AKIP Komponen Pelaporan**

Pendukung:

- Komitmen pimpinan dalam penguatan implementasi SAKIP.
- Koordinasi lintas perangkat daerah dalam penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan.
- Pendampingan dan evaluasi internal secara berkala.

Penghambat:

- Belum seragamnya pemahaman perangkat daerah terhadap kualitas narasi kinerja.
- Fokus pelaporan masih cenderung administratif dibandingkan analisis hasil dan dampak.

➤ **Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pemerintah Kota**

Pendukung:

- Peningkatan standar pelayanan dan kejelasan prosedur layanan.
- Optimalisasi fungsi koordinasi Sekretariat Daerah dalam pelayanan lintas perangkat daerah.
- Pemanfaatan mekanisme pengaduan dan survei kepuasan masyarakat.

Penghambat:

- Masih terdapat variasi kualitas pelayanan antar unit pelayanan.
- Beban kerja aparatur pada periode tertentu berdampak pada kecepatan layanan.

➤ **Indeks Kualitas Kebijakan (IKK)**

Pendukung:

- Penguatan fungsi koordinasi dan asistensi kebijakan oleh Sekretariat Daerah.
- Peningkatan kualitas perencanaan kebijakan berbasis data dan analisis.
- Kolaborasi dengan perangkat daerah dalam penyusunan kebijakan strategis.

Penghambat:

- Pada tahun-tahun sebelumnya, belum optimalnya pemahaman metodologi penilaian IKK.

Keterbatasan SDM analisis kebijakan di beberapa perangkat daerah.

5) Permasalahan

➤ **Nilai Hasil Evaluasi AKIP Komponen Pelaporan**



- Kualitas pelaporan belum sepenuhnya menggambarkan keterkaitan antara perencanaan, pelaksanaan, dan hasil kinerja.
 - Analisis kinerja dalam laporan masih bersifat deskriptif dan belum berbasis evaluasi mendalam.
- **Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pemerintah Kota**
- Konsistensi kualitas pelayanan belum sepenuhnya merata di seluruh unit kerja.
 - Pemanfaatan hasil survei IKM sebagai dasar perbaikan layanan belum optimal.
- **Indeks Kualitas Kebijakan (IKK)**
- Keberlanjutan kualitas kebijakan masih sangat bergantung pada kapasitas SDM.
 - Belum seluruh kebijakan disertai evaluasi kebijakan yang sistematis.
- 6) Solusi dan Upaya
- **Nilai Hasil Evaluasi AKIP Komponen Pelaporan**
- Peningkatan kapasitas SDM pengelola SAKIP melalui bimbingan teknis lanjutan.
 - Penguatan reviu internal sebelum laporan disampaikan ke evaluator eksternal.
 - Penajaman analisis outcome dan dampak dalam dokumen pelaporan kinerja.
- **Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pemerintah Kota**
- Penguatan tindak lanjut hasil survei IKM dalam perbaikan pelayanan.
 - Standarisasi pelayanan lintas unit kerja.
 - Monitoring berkala terhadap unit dengan nilai IKM relatif rendah.
- **Indeks Kualitas Kebijakan (IKK)**
- Penguatan peran analisis kebijakan di lingkungan pemerintah daerah.
 - Penyusunan pedoman evaluasi kebijakan secara terintegrasi.
 - Peningkatan sinergi antar perangkat daerah dalam perumusan kebijakan strategis.



6. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tabel 3.8 Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Tahun 2025

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja (≥100%)	Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	2	3	4	5	6
1	Sasaran: Meningkatnya Kinerja dan Kualitas Pelayanan Pemerintah	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Komponen Pelaporan	94,30	90,15	Efisien
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pemerintah Kota	101,22		Efisien
3	Meningkatnya Kualitas Kebijakan Pemerintah	Indeks Kualitas Kebijakan (IKK)	170,2	95,88	Efisien

Sumber : Data diolah

Berdasarkan Tabel 3.7, capaian kinerja pada masing-masing indikator menunjukkan bahwa sebagian besar indikator telah mencapai bahkan melampaui target yang ditetapkan. Kondisi tersebut didukung oleh tingkat penyerapan anggaran yang berada di bawah 100%.

Capaian kinerja yang optimal dengan realisasi anggaran yang tidak terserap secara penuh menunjukkan adanya efisiensi dalam penggunaan sumber daya. Hal ini mengindikasikan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan telah direncanakan serta diimplementasikan secara efektif, sehingga target kinerja dapat dicapai tanpa memerlukan seluruh alokasi anggaran yang tersedia.

Dengan demikian, terdapat keselarasan antara perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan kegiatan, yang mencerminkan efektivitas dalam alokasi sumber daya serta pengendalian anggaran yang baik. Kondisi ini menjadi indikator positif dalam mendukung akuntabilitas dan peningkatan kinerja organisasi secara berkelanjutan.



7. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan

Tabel 3.9
Program Prioritas dalam Pelaksanaan Sasaran Strategis Tahun 2025

No.	Program Prioritas	Anggaran		
		Pagu	Realisasi	%
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab/Kota	97.666.336.346	88.045.763.225	90.15
2.	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	39.347.273.351	37.928.479.814	96.39
3.	Program Perekonomian dan Pembangunan	4.376.153.579	3.997.476.700	91.36

Sumber : Laporan E-dalev Triwuln 4 Tahun 2025



D. REALISASI ANGGARAN

1. Realisasi Anggaran sesuai dengan Perjanjian Kinerja

Realisasi anggaran sesuai dengan Perjanjian Kinerja pada Tahun 2025 dapat dilihat pada table dibawah ini:

Tabel 3.10
Realisasi Anggaran sesuai dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2025

No	Sasaran	Indikator	Kinerja			Anggaran		
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Pagu	Realisasi	Capaian (%)
1	Meningkatnya Kinerja dan Kualitas Pelayanan Pemerintah	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Komponen Pelaporan	11.75	11.08	94.30	97.666.336.346	88.045.763.225	90.15
		Nilai IKM Pemkot = Jumlah Nilai IKM Perangkat Daerah atau Unit Kerja / Jumlah Perangkat Daerah	90,1	91.2	101.22			
2	Meningkatnya Kualitas Kebijakan Pemerintah	Indeks Kualitas Kebijakan (IKK)	50	85.10	170.2	43.723.426.930	41.925.956.514	95.88



2. Realisasi Anggaran per Program/Kegiatan/Sub Kegiatan

Realisasi Anggaran per Program/Kegiatan/Sub Kegiatan pada tahun 2025 disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 3.11
Realisasi Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Triwulan IV

Program	Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja Triwulan IV	Capaian Kinerja (%)	Realisasi Anggaran (Rp)	Capaian Realisasi Anggaran (%)	Ket
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	382.355.100	80	%	80	100	348.353.100	91,11	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	183.046.000	4	Dokumen	4	100	151.396.000	82,71	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	51.289.100	2	Laporan	2	100	50.489.100	98,44	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	44.375.000	4	Laporan	4	100	43.943.000	99,03	
	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik	19.750.000	4	Dokumen	4	100	19.430.000	99,38	



**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SAMARINDA**

	Sektoral Daerah								
	Pelaksanaan Pengumpulan DatabStatistik Daerah Sektoral	19.750.000	2	Data	2	100	19.715.000	99,82	
	Pelaksanaan Perangkat Berdasarkan Urusan Dalam Penyusunan Perencanaan Daerah Forum Daerah Bidang Yang Diampu Dalam Rangka Dokumen Perangkat Daerah	44.375.000	2	Berita Acara	2	100	44.060.000	99,29	
	Penyusunan Perencanaan Selain Renja PD Dokumen Urusan PD dan Renja PD	19.750.000	1	Dokumen	1	100	19.320.000	97,82	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	35.667.127.666	100	%	100	100	33.694.722.603	94,47	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	29.988.913.639	196	Orang	196	100	28.051.060.575	93,54	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	5.925.000.000	12	Dokumen	12	100	5.528.242.018	99,79	



**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SAMARINDA**

	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	138.243.137	2	Laporan	2	100	115.420.010	83,49	
	Administrasi Barang Milik	0	67,38	Indeks	67,38	100	0 0		
	Sub Kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	0	10	Laporan	10	100	0 0		
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	37.500.000	67,38	Indeks	67,38	100	37.000.000	98,67	
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	32.000.000	5	Paket	5	100	31.500.000	98,44	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	0	9	Orang	9	100	0 0		
	Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	0	10	Orang	10	100	0 0		



**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SAMARINDA**

Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	5.500.000	25	Orang	25	100	5.500.000	100	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	10.982.178.432	51,5	%	51,5	100	8.437.425.446	76,83	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	490.316.500	45	Paket	45	100	419.208.681	85,50	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.240.210.200	65	Paket	60	92,31	557.152.899	44,92	
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	734.489.874	70	Paket	65	92,86	365.786.006	49,80	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	2.944.338.000	30.000	Paket	25.000	83,33	2.873.253.018	97,58	
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	448.820.000	50	Paket	48	96	312.611.372	69,65	
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	0	10	Dokumen	0	0	0	0	
Fasilitasi Kunjungan Tamu	1.614.530.000	4	Laporan	4	100	1.418.199.714	87,84	



**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SAMARINDA**

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3.509.473.858	500	Laporan	450	90	2.491.213.756	70,99	
Penatausahaan Arsip Dinamis	0	1	Laporan	0	0	0	0	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	8.027.362.924	51,5	%	51,5	100	6.481.875.055	80,75	
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	6.245.680.000	24	Unit	22	91,67	5.692.072.005	91,14	
Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	253.300.000	4	Unit	4	100	209.475.000	82,70	
Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.084.237.924	62	Unit	50	80,64	394.746.250	36,41	
Sub Kegiatan Pengadaan Aset Tetap Lainnya	143.900.000	3	Unit	3	100	98.958.000	68,77	
Sub Kegiatan Pengadaan Aset Tak Berwujud	0	2	Unit	1	50	0		
Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0	1	Unit	0	0	0		
Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	300.245.000	1	Unit	1	100	86.623.800	28,85	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	18.943.215.400	67,38	Indeks	67,38	100	18.186.049.967	96,00	



**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SAMARINDA**

	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	0	1	Laporan	1	100	0	0	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	3.574.444.900	62	Laporan	62	100	3.295.324.421	92,19	
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	6.590.930.000	65	Laporan	60	92,31	6.299.550.850	95,58	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	8.777.840.500	40	Laporan	40	100	8.591.174.696	97,87	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	9.304.013.364	51,5	%	51,5	100	7.661.886.628	82,26	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1.322.500.000	85	Unit	70	82,35	1.041.678.208	78,17	



**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SAMARINDA**

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.204.000.000	16	Unit	10	62,5	847.587.215	70,40	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	723.620.000	10	Unit	9	90	595.522.470	82,30	
Sub Kegiatan Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	251.508.000	1	Unit	1	100	112.676.431	44,80	
Sub Kegiatan Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	0	1	Unit	0	0	0	0	
Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	4.932.396.386	3	Unit	3	100	4.526.952.792	91,78	
Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	869.988.978	3	Unit	2	66,67	537.469512	61,78	
Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	3.013.456.650	100	%	100	100	2.246.331.643	74,54	



**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SAMARINDA**

	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	667.553.950	2	Orang/Bulan	2	100	224.791.493	33,67	
	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	442.385.000	6	Paket	6	100	379.420.150	85,77	
	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	103.000.000	4	Orang	4	100	0	0	
	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	1.800.517.700	2	Orang / Bulan	2	100	1.642.120.000	91,20	
	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	2.434.976.048	51,5	%	51,5	100	2.103.577.450	86,39	
	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	731.088.048	12	Paket	12	100	709.422.300	97,04	
	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	551.373.000	12	Paket	12	100	525.913.500	95,38	



**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SAMARINDA**

Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	1.152.515.000	12	Paket	12	100	868.241.650	75,33	
Penataan Organisasi	835.567.762	73,28	Nilai	73,28	100	828.415.334	99,14	
		97,50	%	97,50				
		87,50	%	87,50				
Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	386.512.402	1	Dokumen	1	100	380.102.652	98,34	
Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	142.560.000	1	Laporan	1	100	142.294.000	99,81	
Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	61.274.482	1	Dokumen	1	100	61.197.212	99,87	
Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	41.044.000	1	Dokumen	1	100	40.962.600	99,80	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	204.176.878	1	Dokumen	1	100	203.858.870	99,84	
Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	8.028.561.000	50,5	Indeks	50,5	100	8.020.125.999	99,89	



**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SAMARINDA**

	Fasilitasi Keprotokolan	3.090.000.000	12	Laporan	12	100	3.087.702.000	99,93	
	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	3.290.000.000	12	Laporan	12	100	3.289.920.000	100	
	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	1.648.561.000	12	Laporan	12	100	1.642.503.999	99,63	
PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Administrasi Tata Pemerintahan	1.860.430.736	0,57	%	0,57	100	1.472.165.986	79,13	
	Penataan Administrasi Pemerintahan	273.984.736	1	Dokumen	1	100	166.148.446	60,64	
	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	1.511.721.000	1	Dokumen	1	100	1.267.327.540	83,83	
	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	74.725.000	1	Dokumen	1	100	38.690.000	51,78	
	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	10.453.482.614	N/A		N/A	100	9.651.332.354	92,33	
	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	8.077.135.380	8	Dokumen	8	100	7.300.049.626	90,38	
	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	1.019.249.500	4	Dokumen	4	100	1.006.449.000	98,74	



**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SAMARINDA**

Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	1.220.470.862	3	Dokumen	3	100	1.212.057.062	99,31	
Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	77.228.000	50	Keluarga	50	100	74.483.596	96,45	
Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	59.389.872	50	Keluarga	50	100	58.293.070	98,14	
Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	24.076.339.394	80,3	%	80,3	100	24.044.231.012	99,87	
Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	239.049.430	500	Dokumen	651	130,2	234.391.443	98,05	
Fasilitasi Bantuan Hukum	23.719.888.214	24	Kasus	24	79,17	23.692.657.819	99,89	
Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	117.401.750	500	Dokumen	641	128,2	117.181.750	99,81	



**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SAMARINDA**

	Fasilitasi Kerjasama Daerah	2.957.020.607	74,42	%	74,42	100	2.760.750.462	93,36	
	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	2.065.077.734	24	Dokumen	24	100	1.891.455.037	91,59	
	Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	703.008.973	1	Dokumen	1	100	689.523.625	98,08	
	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	188.933.900	4	Laporan	4	100	179.771.800	95,15	
PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	1.217.083.205	93	%	93	100	1.196.304.112	98,29	
	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMN dan BLUD	159.422.058	2	Dokumen	2	100	156.497.348	98,17	
	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	760.767.747	5	Laporan	5	100	755.812.964	99,35	
	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	220.570.900	2	Dokumen	2	100	208.511.300	94,53	
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan BLUD	76.322.500	2	Dokumen	2	100	75.482.500	98,90	
	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	1.186.852.560	95	%	95	100	1.366.310.564	86,87	



**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SAMARINDA**

Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	205.279.342	4	Dokumen	4	100	246.759.844	83,19	
Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	605.628.250	4	Laporan	4	100	534.442.748	88,25	
Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	513.922.470	12	Laporan	12	100	447.130.470	87,00	
Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	1.548.714.940	91	%	91	100	1.398.676.033	90,31	
Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	766.281.000	2	Dokumen	2	100	688.374.013	89,83	
Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	341.967.000	2	Dokumen	2	100	317.229.620	92,77	
Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	440.466.940	37	Orang	37	100	393.072.400	89,24	
Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	244.044.870	80	%	80	100	215.643.995	88,36	
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan	50.961.500	4	Dokumen	4	100	50.961.500	100	



**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SAMARINDA**

	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	32.065.875	4	Dokumen	4	100	32.065.000	100	
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	161.017.495	4	Dokumen	4	100	132.617.495	82,36	



E. PENILAIAN KINERJA ORGANISASI

Tabel 3.12
Penilaian Kinerja Organisasi

Nilai AKIP Sekretariat Daerah Tahun 2024: 73,25

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Normalisasi Capaian PK (1)	Koreksi Normalisasi Capaian PK berdasarkan Predikat AKIP (2)	Nilai Akhir Capaian PK (3) (1) X (100% - (2))	Nilai SAKIP
1	Meningkatnya Kinerja dan Kualitas Pelayanan Pemerintah	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Komponen Pelaporan	11,75	11,08	94,30%	94,30%	10%	84,87%	73,25
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pemerintah Kota	90,1	91,2	101,22%	101,22%	10%	91,10%	
2	Meningkatnya Kualitas Kebijakan Pemerintah	Indeks Kualitas Kebijakan (IKK)	50	85,1	170,20%	110%	10%	99,00%	
	Total Capaian PK (4)							274,97%	
	Nilai Kinerja Organisasi (NKO) atau Rata-rata Capaian PK (5)							91,66%	
	Predikat PKO (6)							Baik	



BAB IV

P E N U T U P

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat Daerah Kota Samarinda Tahun 2025 disusun berdasarkan RENSTRA Sekretariat Daerah Kota Samarinda Tahun 2025-2029 yang menyajikan gambaran tingkat pencapaian kinerja sasaran instansi sebagai penjabaran capaian strategis yang ditunjukkan oleh Sekretariat Daerah Kota Samarinda pada Tahun Anggaran 2025. Berbagai capaian strategis tersebut tercermin dalam capaian Indikator Kinerja Utama (IKU), maupun analisa kinerja berdasarkan tujuan dan sasaran.

Berdasarkan hasil pengukuran dan evaluasi terhadap capaian indikator kinerja utama, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan Sekretariat Daerah Kota Samarinda pada Tahun 2025 secara umum telah berjalan sesuai dengan perencanaan dan Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan. Capaian kinerja menunjukkan adanya upaya yang konsisten dalam meningkatkan akuntabilitas kinerja, kualitas pelayanan publik, serta tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat Daerah Kota Samarinda Tahun 2025 ini disusun sebagai wujud komitmen terhadap prinsip transparansi, akuntabilitas, dan peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan.



LAMPIRAN



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Kesuma Bangsa No.82, Kelurahan Bugis, Kec. Samarinda Kota,
Kota Samarinda, Kalimantan Timur Kode Pos 75121

Laman <https://samarindakota.go.id>

Pos-el: info@samarindakota.go.id

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SAMARINDA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Hero Mardanus Satyawan
Jabatan : Sekretaris Daerah Kota Samarinda

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Andi Harun
Jabatan : Walikota Samarinda

Selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Samarinda, 10 November 2025

WALIKOTA SAMARINDA



PIHAK KEDUA

Andi Harun

SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA

PIHAK PERTAMA

Hero Mardanus Satyawan

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SAMARINDA**

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	Meningkatnya Kinerja dan Kualitas Pelayanan Pemerintah	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Komponen Pelaporan	Nilai	11,75
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pemerintah Kota	Indeks	90,1
2	Meningkatnya Kualitas Kebijakan Pemerintah	Indeks Kualitas Kebijakan (IKK)	Indeks	50

Program

- 1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- 2 Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
- 3 Program Perekonomian dan Pembangunan

Anggaran

Rp	97.666.336.346
Rp	39.347.273.351
Rp	4.376.153.579
Rp	141.389.763.276

Samarinda, 10 November 2025



**WALIKOTA SAMARINDA
PIHAK KEDUA**

Andi Harun

**SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA
PIHAK PERTAMA**

Hero Mardanus Satyawati

**Pengukuran Kinerja
Sekretariat Daerah Kota Samarinda
Triwulan IV
Tahun 2025**

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM	TARGET		REALISASI		K (%)	Rp (%)		
			KINERJA	ANGGARAN (Rp.)	KINERJA	ANGGARAN (Rp.)				
Meningkatnya Kinerja dan Kualitas Pelayanan Pemerintah	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Komponen Pelaporan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	11,75	Nilai	97.666.336.346	11,08	Nilai	94,30	90,15	
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pemerintah Kota		90,1	Indeks		91,2	Indeks	101,22		
Meningkatnya Kualitas Kebijakan Pemerintah	Indeks Kualitas Kebijakan (IKK)	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	50	Indeks	39.347.273.351	85,10	Indeks	37.928.479.814	170,20	96,39
		Program Perekonomian dan Pembangunan			4.376.153.579			3.997.476.700	91,35	
					141.389.763.276			129.971.719.739	121,91	91,92

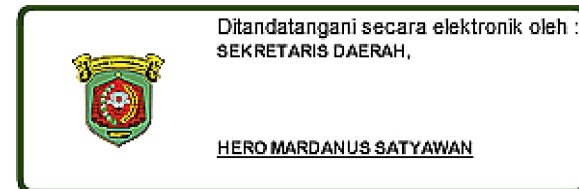
LAMPIRAN
 KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA
 NOMOR: 000.1/158/HK-KS/XII/2025
 TENTANG
 INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) SEKRETARIAT DAERAH KOTA SAMARINDA
 TAHUN 2025-2029

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) SEKRETARIAT DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2025-2029

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Dasar Hukum	Definisi Operasional	Formulasi	Sumber Data
1	Meningkatnya Kinerja dan Kualitas Pelayanan Pemerintah	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Komponen Pelaporan	Nilai	Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) PermenPANRB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Perwali Nomor 11 Tahun 2024	Nilai yang diperoleh pemerintah daerah berdasarkan hasil evaluasi Kementerian PANRB terhadap pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), khusus pada komponen pelaporan. Penilaian mencakup kelengkapan, kualitas, dan konsistensi laporan kinerja sesuai ketentuan dalam PermenPANRB Nomor 88 Tahun 2021. Evaluasi dilakukan setiap tahun untuk mengukur sejauh mana instansi melaksanakan prinsip akuntabilitas kinerja	Nilai Hasil Evaluasi AKIP Pemerintah Komponen Pelaporan	LHE KemenpanRB
		Indeks Kepuasan Masyarakat Pemerintah Kota	Indeks		Nilai yang mencerminkan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik yang diberikan oleh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota. Indeks dihitung berdasarkan survei persepsi masyarakat terhadap aspek kecepatan, ketepatan, kenyamanan, kemudahan, dan kualitas layanan sesuai ketentuan Peraturan Menteri PANRB tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat.	Nilai IKM Pemkot = Jumlah Nilai IKM Perangkat Daerah atau Unit Kerja / Jumlah Perangkat Daerah	Aplikasi e-KIANPUAS Bagian Organisasi

2	Meningkatnya Kualitas Kebijakan Pemerintah	Indeks Kualitas Kebijakan (IKK)	Indeks		Nilai yang menggambarkan kualitas penyusunan kebijakan pemerintah daerah berdasarkan kriteria partisipasi publik, transparansi, berbasis data, efektivitas, dan dampak kebijakan. Penilaian dilakukan oleh Lembaga Administrasi Negara (LAN) melalui metode evaluasi kebijakan yang terstandar, dengan tujuan meningkatkan mutu perumusan kebijakan di daerah.	Nilai Hasil Evaluasi Kebijakan	LHE LAN
---	--	---------------------------------	--------	--	--	--------------------------------	---------

a.n.WALI KOTA SAMARINDA



Unduh DOKUMEN ASLI di <https://ttev2.samarindakota.go.id> dengan

#ID DOK : 24792-2026-16-60-010

REALISASI KEUANGAN TAHUN 2025
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SAMARINDA

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	APBD	REALISASI KEUANGAN	%	BAGIAN PENGAMPU
SEKRETARIAT DAERAH		141.389.763.276,00	129.971.719.739,00	91,92	
4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	39.347.273.351,00	37.928.479.814,00	96,39	
4.01.02.2.01	ADMINISTRASI TATA PEMERINTAHAN	1.860.430.736,00	1.472.165.986,00	79,13	PEMERINTAHAN
4.01.02.2.01.0001	Penataan Administrasi Pemerintahan	273.984.736,00	166.148.446,00	60,64	
4.01.02.2.01.0002	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	1.511.721.000,00	1.267.327.540,00	83,83	
4.01.02.2.01.0003	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	74.725.000,00	38.690.000,00	51,78	
4.01.02.2.02	PELAKSANAAN KEBIJAKAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	10.453.482.614,00	9.651.332.354,00	92,33	KESEJAHTERAAN RAKYAT
4.01.02.2.02.0001	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	8.077.135.380,00	7.300.049.626,00	90,38	
4.01.02.2.02.0002	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	1.019.249.500,00	1.006.449.000,00	98,74	
4.01.02.2.02.0003	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	1.220.470.862,00	1.212.057.062,00	99,31	
4.01.02.2.02.0004	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar Keluarga, Warga dan Kelompok Masyarakat	77.228.000,00	74.483.596,00	96,45	
4.01.02.2.02.0006	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	59.398.872,00	58.293.070,00	98,14	
4.01.02.2.03	FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM	24.076.339.394,00	24.044.231.012,00	99,87	HUKUM
4.01.02.2.03.0001	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	239.049.430,00	234.391.443,00	98,05	
4.01.02.2.03.0002	Fasilitasi Bantuan Hukum	23.719.888.214,00	23.692.657.819,00	99,89	
4.01.02.2.03.0003	Pendokumentasi Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	117.401.750,00	117.181.750,00	99,81	
4.01.02.2.04	FASILITASI KERJA SAMA DAERAH	2.957.020.607,00	2.760.750.462,00	93,36	KERJASAMA
4.01.02.2.04.0001	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	2.065.077.734,00	1.891.455.037,00	91,59	
4.01.02.2.04.0002	Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	703.008.973,00	689.523.625,00	98,08	
4.01.02.2.04.0003	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	188.933.900,00	179.771.800,00	95,15	
4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	4.376.153.579,00	3.997.476.700,00	91,35	
4.01.03.2.01	PELAKSANAAN KEBIJAKAN PEREKONOMIAN	1.217.083.205,00	1.196.304.112,00	98,29	PEREKONOMIAN
4.01.03.2.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	159.422.058,00	156.497.348,00	98,17	
4.01.03.2.01.0002	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	760.767.747,00	755.812.964,00	99,35	
4.01.03.2.01.0003	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	220.570.900,00	208.511.300,00	94,53	
4.01.03.2.01.0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan BLUD	76.322.500,00	75.482.500,00	98,90	
4.01.03.2.02	PELAKSANAAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	1.366.310.564,00	1.186.852.560,00	86,87	ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
4.01.03.2.02.0001	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	246.759.844,00	205.279.342,00	83,19	
4.01.03.2.02.0002	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	605.628.250,00	534.442.748,00	88,25	
4.01.03.2.02.0003	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	513.922.470,00	447.130.470,00	87,00	

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	APBD	REALISASI KEUANGAN	%	BAGIAN PENGAMPU
4.01.03.2.03	PENGLOLAAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	1.548.714.940,00	1.398.676.033,00	90,31	PENGADAAN BARANG DAN JASA
4/01.03.2.03.0001	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	766.281.000,00	688.374.013,00	89,83	
4/01.03.2.03.0002	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	341.967.000,00	317.229.620,00	92,77	
4/01.03.2.03.0003	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	440.466.940,00	393.072.400,00	89,24	
4.01.03.2.04	PEMANTAUAN KEBIJAKAN SUMBER DAYA ALAM	244.044.870,00	215.643.995,00	88,36	SUMBER DAYA ALAM
4.01.03.2.04.0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan	50.961.500,00	50.961.500,00	100,00	
4.01.03.2.04.0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	32.065.875,00	32.065.000,00	100,00	
4.01.03.2.04.0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	161.017.495,00	132.617.495,00	82,36	
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	97.666.336.346,00	88.045.763.225,00	90,15	PERENCANAAN DAN KEUANGAN
4.01.01.2.01	PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	382.335.100,00	348.353.100,00	91,11	
4.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	183.046.000,00	151.396.000,00	82,71	
4.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	51.289.100,00	50.489.100,00	98,44	
4.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	44.375.000,00	43.943.000,00	99,03	
4.01.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	19.750.000,00	19.430.000,00	98,38	
4.01.01.2.01.0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	19.750.000,00	19.715.000,00	99,82	
4.01.01.2.01.0010	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	44.375.000,00	44.060.000,00	99,29	
4.01.01.2.01.0011	Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Ranja PD	19.750.000,00	19.320.000,00	97,82	
4.01.01.2.02	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	35.667.127.666,00	33.694.722.603,00	94,47	
4.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	29.988.913.639,00	28.051.060.575,00	93,54	
4.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	5.539.970.890,00	5.528.242.018,00	99,79	
4.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	138.243.137,00	115.420.010,00	83,49	
4.01.01.2.03	ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH	-	-	-	
4.01.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	-	-	-	
4.01.01.2.05	ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	37.500.000,00	37.000.000,00	98,67	
4.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	32.000.000,00	31.500.000,00	98,44	
4.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	-	-	-	
4.01.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	-	-	-	
4.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	5.500.000,00	5.500.000,00	100,00	
4.01.01.2.06	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	10.982.220.432,00	8.437.425.446,00	76,83	UMUM

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	APBD	REALISASI KEUANGAN	%	BAGIAN PENGAMPU	
4.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	490.316.500,00	419.208.681,00	85,50		
4.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.240.210.200,00	557.152.899,00	44,92		
4.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	734.489.874,00	365.786.006,00	49,80		
4.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	2.944.380.000,00	2.873.253.018,00	97,58		
4.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	448.820.000,00	312.611.372,00	69,65		
4.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	-	-	-		
4.01.01.2.06.0008	Fasilitas Kunjungan Tamu	1.614.530.000,00	1.418.199.714,00	87,84		
4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3.509.473.858,00	2.491.213.756,00	70,99		
4.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	-	-	-		
4.01.01.2.07	PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	8.027.362.924,00	6.481.875.055,00	80,75		UMUM
4.01.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	6.245.680.000,00	5.692.072.005,00	91,14		
4.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	253.300.000,00	209.475.000,00	82,70		
4.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	1.084.237.924,00	394.746.250,00	36,41		
4.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	143.900.000,00	98.958.000,00	68,77		
4.01.01.2.07.0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	-	-	-		
4.01.01.2.07.0008	Pengadaan Aset Tak Berwujud	-	-	-		
4.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	300.245.000,00	86.623.800,00	28,85		
4.01.01.2.08	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	18.943.215.400,00	18.186.049.967,00	96,00		
4.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	-	-		
4.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	3.574.444.900,00	3.295.324.421,00	92,19		
4.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	6.590.930.000,00	6.299.550.850,00	95,58		
4.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	8.777.840.500,00	8.591.174.696,00	97,87		
4.01.01.2.09	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	9.314.013.364,00	7.661.886.628,00	82,26		
4.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1.332.500.000,00	1.041.678.208,00	78,17		
4.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.204.000.000,00	847.587.215,00	70,40		
4.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	723.620.000,00	595.522.470,00	82,30		
4.01.01.2.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	251.508.000,00	112.676.431,00	44,80		
4.01.01.2.09.0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	-	-	-		
4.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	4.932.396.386,00	4.526.952.792,00	91,78		
4.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	869.988.978,00	537.469.512,00	61,78		
4.01.01.2.11	ADMINISTRASI KEUANGAN DAN OPERASIONAL KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH	3.013.456.650,00	2.246.331.643,00	74,54		PERENCANAAN DAN KEUANGAN
4.01.01.2.11.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	667.553.950,00	224.791.493,00	33,67		

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	APBD	REALISASI KEUANGAN	%	BAGIAN PENGAMPU
4.01.01.2.11.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	442.385.000,00	379.420.150,00	85,77	PERENCANAAN DAN KEUANGAN
4.01.01.2.11.0003	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	103.000.000,00	-	-	
4.01.01.2.11.0004	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	1.800.517.700,00	1.642.120.000,00	91,20	
4.01.01.2.12	FASILITASI KERUMAHTANGGAAN SEKRETARIAT DAERAH	2.434.976.048,00	2.103.577.450,00	86,39	UMUM
4.01.01.2.12.0001	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	731.088.048,00	709.422.300,00	97,04	
4.01.01.2.12.0002	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	551.373.000,00	525.913.500,00	95,38	
4.01.01.2.12.0003	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	1.152.515.000,00	868.241.650,00	75,33	
4.01.01.2.13	PENATAAN ORGANISASI	835.567.762,00	828.415.334,00	99,14	ORGANISASI
4.01.01.2.13.0001	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	386.512.402,00	380.102.652,00	98,34	
4.01.01.2.13.0002	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	142.560.000,00	142.294.000,00	99,81	
4.01.01.2.13.0003	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	61.274.482,00	61.197.212,00	99,87	
4.01.01.2.13.0004	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	41.044.000,00	40.962.600,00	99,80	
4.01.01.2.13.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	204.176.878,00	203.858.870,00	99,84	
4.01.01.2.14	PELAKSANAAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN	8.028.561.000,00	8.020.125.999,00	99,89	PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN
4.01.01.2.14.0001	Fasilitasi Keprotokolan	3.090.000.000,00	3.087.702.000,00	99,93	
4.01.01.2.14.0002	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	3.290.000.000,00	3.289.920.000,00	100,00	
4.01.01.2.14.0003	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	1.648.561.000,00	1.642.503.999,00	99,63	

Samarinda, 30 Januari 2026

Mengetahui,
Sekretaris Daerah



HERO MARDANUS SATYAWAN

Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Perangkat Daerah/ Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Tahun berjalan yg dievaluasi (2025)	Triwulan 1				Triwulan 2				Triwulan 3				Triwulan 4				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota yang Dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Alasan tercapai dan tidak tercapainya program (2025)	Faktor pendorong penghambatnya							
				K	Rp	Sumber Dana 1	K 1	Rp 1	Faktor Pendorong 1	Faktor Penghambat 1	Sumber Dana 2	K 2	Rp 2	Faktor Pendorong 2	Faktor Penghambat 2	Sumber Dana 3	K 3	Rp 3	Faktor Pendorong 3	Faktor Penghambat 3	Sumber Dana 4	K 4	Rp 4	Faktor Pendorong 4	Faktor Penghambat 4			K	Rp	K	Rp			
4	1	1	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	8.027.362.924				311.257.250					1.407.700.000					1.447.000.000								6.481.875.055	8.843.347.907	96.05	91.15				
4	1	1	2.07		Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Sekretariat Daerah	51,50%				0				0												51.5						100		
4	1	1	2.07	1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	6.245.680.000	PAD			0			PAD	1.407.700.000					PAD	1.327.000.000							2.957.372.005	5.692.072.005	91.67	90.76				
4	1	1	2.07	1	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	24 Unit				0			1			Tersedianya Anggaran				5						22						91.67		
4	1	1	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	300.245.000	PAD			0				0					PAD	-							86.623.800	86.623.800	284.524.800	100	94.76			
4	1	1	2.07	10	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit				0							Anggaran belum mencukupi			0						1							100	
4	1	1	2.07	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	253.300.000	PAD			0				0					PAD	120.000.000							89.475.000	209.475.000	209.475.000	100	82.7			
4	1	1	2.07	2	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	4 Unit				1				0		Tersedia Anggaran				0						4							100	
4	1	1	2.07	5	Pengadaan Mebel	1.084.237.924	PAD			311.257.250				0					PAD	-							83.489.000	394.746.250	2.566.113.102	80.65	95.9			
4	1	1	2.07	5	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	62 Unit				29				5		Tersedia Anggaran				3						50							80.65	
4	1	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	143.900.000	PAD			0				0					PAD	-							98.958.000	98.958.000	114.756.000	100	79.75			
4	1	1	2.07	6	Jumlah Unit Perawatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit				0				0		Tersedia Anggaran				0						3							100	
4	1	1	2.07	7	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	-	PAD			0				0					PAD	-							-	0	0	0	0	0	0	
4	1	1	2.07	7	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	2 Unit				0				0						0													0	
4	1	1	2.07	8	Pengadaan Aset Tak Berwujud	-	PAD			0				0					PAD	-							-	0	0	0	0	0	0	

Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Perangkat Daerah/ Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Tahun berjalan yg dievaluasi (2025)	Triwulan 1						Triwulan 2						Triwulan 3						Triwulan 4						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota yang Dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Alasan tercapai dan tidak tercapainya program (2025)	Faktor pendorong penghambatnya	
				K	Rp	Sumber Dana	K	Rp	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat	Sumber Dana	K	Rp	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat	Sumber Dana	K	Rp	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat	Sumber Dana	K	Rp	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat	K	Rp	K	Rp	K	Rp					
				1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2			2
4	1	1	2.07	8	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	1 Unit		0	-						0	-									0											
Rata-rata capaian kinerja (%)																										96.05	91.15									
Predikat Kinerja																										ST	ST									
4	1	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		18.943.215.400			2.261.535.826					4.534.393.537										7.500.195.824				18.186.049.967		25.788.490.454	98.08	77.37			
4	1	1	2.08		IKM Pelayanan Bagian Umum	67,38 NILAI			0				0												89.18			89.18				132.35				
4	1	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		-	PAD		-					PAD															0		0				
4	1	1	2.08	1	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan			0																											
4	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		3.574.444.900	PAD		708.439.096					PAD													3.295.324.421		6.512.442.979	100	92.18				
4	1	1	2.08	2	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang	62 Laporan			15		Tersedia Anggaran			15		Tersedia Anggaran			20						12			62				100				
4	1	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		6.590.930.000	PAD		239.787.000					PAD													6.299.550.850		2.860.820.745	92.31	43.41				
4	1	1	2.08	3	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	65 Laporan			10		Tersedia Anggaran			20		Tersedia Anggaran			20									60				92.31				
4	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		8.777.840.500	PAD		1.313.309.730					PAD													8.591.174.696		16.415.226.730	100	96.84				
4	1	1	2.08	4	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	40 Laporan			9		Tersedia Anggaran			9		Tersedia Anggaran			9									40				100				
Rata-rata capaian kinerja (%)																										98.08	77.37									
Predikat Kinerja																										ST	T									
4	1	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		9.314.013.364			236.473.776					944.221.641													7.661.886.628		12.339.162.553	85.93	49.07				
4	1	1	2.09		Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Sekretariat Daerah	51,50%			0				0													51.5		51.5				100				
4	1	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		1.332.500.000	PAD		78.840.608					PAD													1.041.678.208		1.670.468.141	82.35	46.14				
4	1	1	2.09	1	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	85 Unit			25		Tersedia Anggaran			25		Tersedia Anggaran			20									70				82.35				
4	1	1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		869.988.978			-					PAD													537.469.512		1.981.502.016	100	39.34				

Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Perangkat Daerah/ Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Tahun berjalan yg dievaluasi (2025)		Triwulan 1				Triwulan 2				Triwulan 3				Triwulan 4				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota yang Dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Alasan tercapai dan tidak tercapainya program (2025)	Faktor pendorong penghambatnya																										
					K	Rp	Sumber Dana 1	K 1	Rp 1	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat	Sumber Dana 2	K 2	Rp 2	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat	Sumber Dana 3	K 3	Rp 3	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat	Sumber Dana 4	K 4	Rp 4	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat			K	Rp	K	Rp	K	Rp																				
4	1	1	2.11	1	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang/Bulan			0	Tersedia sarana dan prasarana gaji dan tunjangan KDH/W KDH	Tidak ada hambatan			0	Tersedia sarana dan prasarana serta anggaran yang mendukung	Kebutuhan Gaji KDH dan WKDH tidak mengalami hambatan, karena kebutuhan terpenuhi					1	Aplikasi SIPD	-					1	Tersedia sarana dan prasarana yang ada	Tidak ada hambatan			2						100		tidak ada hambatan													
4	1	1	2.11	2	Penyediaan Pakai Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		442.385.000	PAD		-			PAD		149.561.400						PAD		-					229.858.750					379.420.150	845.650.150	100	85.77																		
4	1	1	2.11	2	Jumlah Paket Pakai Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	6 Paket			0	Tersedia sarana dan prasarana yang ada	Tidak ada hambatan			1	Tersedia sarana dan prasarana serta anggaran yang mendukung	terkendala adanya permintaan KDH dan WKDH yang belum terbayar karena anggaran yang belum maksimal											5	Tersedia sarana dan prasarana yang mendukung	Tidak ada hambatan			6						100		Tidak ada hambatan														
4	1	1	2.11	3	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		103.000.000	PAD		-			PAD		-							PAD		-				-					53.736.762		0	0																		
4	1	1	2.11	3	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	4 Orang			0	Tersedia sarana dan prasarana yang mendukung	-			0	Untuk anggaran sudah mendukung	Tidak ada hambatan,																		0						0														
4	1	1	2.11	4	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		1.800.517.700	PAD		150.000.000				PAD		424.500.000													784.620.000					1.642.120.000	2.927.996.800	100	83.73																	
4	1	1	2.11	4	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang/Bulan			1	Tersedia sarana dan prasarana yang didukung	tidak ada			0	Tersedia anggaran yang mendukung	Tidak adanya hambatan untuk kegiatan operasional KDH dan WKDH												1	Tersedia sarana dan prasarana yang mendukung	tidak ada hambatan			2						100		tidak ada hambatan													
Rata-rata capaian kinerja (%)																																																						
Predikat Kinerja																																																						
4	1	1	2.12		Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah		2.434.976.048			81.094.000					562.082.191													819.438.677					2.103.577.450	3.697.542.636	91.67	66.84																		
4	1	1	2.12		Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Sekretariat Daerah	51,50%							0														51,5													100														
4	1	1	2.12	1	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah		731.088.048			-			PAD		234.195.500													PAD		327.621.500				709.422.300	953.300.000	91.67	52.22																	

Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan)	Perangkat Daerah/ Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Tahun berjalan yg dievaluasi (2025)		Triwulan 1				Triwulan 2				Triwulan 3				Triwulan 4				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota yang Dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Alasan tercapai dan tidak tercapainya program (2025)	Faktor pendorong penghambatnya		
					K	Rp	Sumber Dana	K	Rp	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat	Sumber Dana	K	Rp	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat	Sumber Dana	K	Rp	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat	Sumber Dana	K	Rp	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat			K	Rp
4.01 .0. 0.0. 00.0 1.00 00	Se kre tani at Da era h Kot a Sa ma rin da	141,389,763,276			14,725,50 3,317	1	1			35,253,63 5,005	2	2			25,478,1 03,264	3	3			46,757,663 ,401	4	4			4	4	99.33	86.44		